



# RENJA RENCANA KINERJA PERANGKAT DAERAH

# 2024



**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA  
BERENCANA KABUPATEN PURWAKARTA**

Jl. Purnawarman Barat No. 5/9 Purwakarta telp/fax. 201006 Kode Pos. 41112



BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA  
NOMOR 92 TAHUN 2023

TENTANG  
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Purwakarta tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah tentang Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
18. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
19. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
20. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
21. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
30. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 388);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor );
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025. (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 236);
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262); Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2006 Nomor 4);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2006 Nomor 4);

35. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 16);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 11);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);
38. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 66 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 66);
39. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 88 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 88);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom;
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta;

4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta;
5. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah;
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
7. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun;
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pemerintah Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud disusunnya Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yaitu sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan serta mengevaluasi hasil kinerja perangkat daerah setiap tahun berdasarkan capaian target indikator program yang telah ditetapkan.



### Pasal 3

Tujuan disusunnya Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yaitu :

- a. sebagai penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026;
- b. sebagai pelaksana teknis kegiatan prioritas pembangunan daerah, yang berpedoman pada RPD dan RKPD;
- c. mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan harmonisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan antar sektor, wilayah dan fungsi maupun tingkatan pemerintahan;
- d. sebagai instrumen dalam mengukur capaian kinerja perangkat daerah berdasarkan capaian target indikator program yang telah ditetapkan;

## BAB III

### SISTEMATIKA RENJA PERANGKAT DAERAH

### Pasal 4

- (1) Sistematika penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagai berikut :

#### BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

#### BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

### BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

### BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

### BAB V PENUTUP

- (2) Uraian sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang pada masing-masing Renja Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta.

#### Pasal 5

Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (2) terdiri dari :

1. Dinas Pendidikan;
2. Dinas Kesehatan;
3. Rumah Sakit Bayu Asih;
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
5. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
6. Satuan Polisi Pamong Praja;
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
8. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
9. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
10. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi;
11. Dinas Pangan dan Pertanian;
12. Dinas Lingkungan Hidup;
13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
15. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

16. Dinas Perhubungan;
17. Dinas Komunikasi dan Informatika;
18. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian;
19. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
20. Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan;
21. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
22. Dinas Perikanan dan Peternakan;
23. Sekretariat Daerah;
24. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
25. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
26. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
27. Badan Pendapatan Daerah;
28. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
29. Inspektorat;
30. Kecamatan Jatiluhur;
31. Kecamatan Sukasari;
32. Kecamatan Maniis;
33. Kecamatan Tegalwaru;
34. Kecamatan Plered;
35. Kecamatan Sukatani;
36. Kecamatan Darangdan;
37. Kecamatan Bojong;
38. Kecamatan Wanayasa;
39. Kecamatan Kiarapedes;
40. Kecamatan Pasawahan;
41. Kecamatan Pondoksalam;
42. Kecamatan Purwakarta;
43. Kecamatan Babakan Cikao;

- 44. Kecamatan Campaka;
- 45. Kecamatan Cibatu;
- 46. Kecamatan Bungursari;
- 47. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

Pasal 6

Perubahan Renja Perangkat Daerah dilakukan apabila terjadi  
Perubahan RKPD Kabupaten Purwakarta

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal  
diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan  
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya  
dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal 27 Juli 2023

BUPATI PURWAKARTA,



Diundangkan di Purwakarta  
pada tanggal 27 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA,



BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 92



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA**  
**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PURWAKARTA**

Jalan Purnawarman Barat No. 5/9 Telp. (0264) 201006, Fax. (0264) 201006 Purwakarta

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**  
**KABUPATEN PURWAKARTA**

**NOMOR :        /        Kep. DPPKB/2023**  
**LAMPIRAN : 1 ( Satu ) Berkas**

**TENTANG**  
**PEMEBETUKAN TIM PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA KERJA (RENJA)**  
**TAHUN 2024**  
**PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**  
**KABUPATEN PURWAKARTA**

**KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**  
**KABUPATEN PURWAKARTA**

+

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2024, yang dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah tahunan, maka perlu disusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional, dan pembangunan daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 dengan Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1698 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968, Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (LNRI Tahun 2003 Nomor 47, TLN 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (LNRI Tahun 2004 Nomor 5, TLN 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (LNRI Tahun 2004 Nomor 66, TLNRI Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang sistem Perencanaan pembangunan Nasional Khususnya pasal 7 ayat (2) bahwa Renja SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKP, memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 164, TLN Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (LNRI Tahun 2004 Nomor 104, TLN Nomor 4421).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Lembaga Teknis
11. Daerah;  
Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tatacara Penyusunan Dokumen
12. Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah;
13. Peraturan Daerah Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Bupati Kabupaten Purwakarta Nomor 88 Tahun 2023, tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Kabupaten Purwakarta (RKPD).

15. Peraturan Bupati Kabupaten Purwakarta Nomor 92 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023
16. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Tim Penyusunan dokumen Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2024 yang tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Kabupaten Purwakarta menjadi pedoman Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Kabupaten Purwakarta dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2024;
- KETIGA : Keputusan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal 28 Juli 2023

**KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN PURWAKARTA**

**H.YAYAT HIDAYAT,S.Sos**  
NIP. 19700215199703 1 009

## KATA PENGANTAR

Dengan Memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja ( Renja ) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta Tahun 2024

Laporan Rencana Kerja ini disusun dengan tujuan sebagai acuan dalam menyusun rencana anggaran berbasis Kinerja dan sebagai panduan dalam mengelola sumber daya yang dimiliki untuk mencapai sasaran Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada tahun 2024.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2024, Mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2024-2026 yang merupakan penjabaran program pembangunan daerah khususnya Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purwakarta, sehingga tahapan-tahapan pembangunan Keluarga Berencana, Kesehatan reproduksi remaja, ketahanan dan pemberdayaan keluarga, penguatan kelembagaan keluarga kecil berkualitas dari pedoman yang telah ditetapkan untuk mencapai sasaran secara efektif dan akuntabel.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa di dalam penyusunan Rencana Kerja ini masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penyajian data maupun kegiatan.

Oleh karena itu kami senantiasa mengharapkan masukan untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut sehingga Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2024 dapat tersusun secara optimal dan berkualitas.



Akhir kata kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak, khususnya kepada anggota tim penyusun Rencana Kerja (Renja) yang telah banyak membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini. Mudah-mudahan dokumen ini dapat menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi, Kewenangan dan program serta kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta pada Tahun 2024.

Purwakarta, 2023

**Kepala,  
Dinas Pengendalian Penduduk dan  
Keluarga Berencana  
Kabupaten Purwakarta**

**H.YAYAT HIDAYAT, S.Sos**  
NIP.19700215199703 1 009

## DAFTAR ISI

|                                                                                                              |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| KATA PENGANTAR.....                                                                                          | i      |
| DAFTAR ISI.....                                                                                              | i      |
| 1.1.LATAR BELAKANG.....                                                                                      | 1      |
| 1.2.LANDASAN HUKUM.....                                                                                      | 3      |
| 1.3.MAKSUD DAN TUJUAN.....                                                                                   | 8      |
| 1.4.SISTEM MATIKA PENULISAN.....                                                                             | 10     |
| <br>BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKATA DAERAH TAHUN LALU .....                                           | <br>11 |
| 2.1.HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN<br>LALU DAN CAPIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH..... | 11     |
| 2.2.ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....                                                         | 17     |
| 2.3.ISU-ISU PENTING PENYELANGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI<br>PERANGKAT DAERAH.....                                | 20     |
| 2.4.RIVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD.....                                                                 | 22     |
| 2.5.PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT.....                                                   | 32     |
| <br>BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....                                                         | <br>34 |
| 3.1.TELAHAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL.....                                                                 | 34     |
| 3.2.TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH.....                                                           | 36     |
| 3.3.PROGRAM DAN KEGIATAN.....                                                                                | 37     |
| <br>BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....                                                 | <br>48 |
| <br>BAB V PENUTUP.....                                                                                       | <br>58 |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja PD memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran Rencana kerja ini disusun dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan dan Pengendalian pelaksanaan kegiatan, mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, berkeadilan dan berkelanjutan guna mencapai suatu keadaan yang lebih baik dimasa yang akan datang.

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Rencana kerja ini disusun dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan dan Pengendalian pelaksanaan kegiatan, mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, berkeadilan dan berkelanjutan guna mencapai suatu keadaan yang lebih baik dimasa yang akan datang.

Untuk mewujudkan sinergitas dan pencapaian prioritas pembangunan telah dirumuskan pula tujuan bersama (*common goals*), yaitu ; *Salapan Langkah Ngawangun Nagri Raharja dan Tujuh belas Prinsip Kahuripan Purwakarta*, yang telah menjadi komitmen semua pihak dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan Tahunan.

Penyusunan Rencana Kerja ( Renja ) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 mengacu kepada *Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 88 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta (RKPD ) 2024-2026*, dan Rencana Strategis Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) ini adalah sebagai

pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Pelaksanaan program dan Kegiatan Pembangunan serta mengevaluasi hasil kinerja Perangkat Daerah setiap tahun berdasarkan capaian target indikator program yang telah ditetapkan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta yang kemudian menjadi bahan dalam penyusunan RAPBD Kabupaten Purwakarta. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.

## **1.2. Landasan Hukum**

### **1.2.1. Ketentuan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan Kewenangan Perangkat Daerah**

Berdasarkan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas, dan Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan Dinas dalam melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan daerah di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana Kab Purwakarta;
2. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang Pengendalian pendudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta ;
4. Penyelenggaraan pembinaan ketatausahaan Dinas; dan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pokok dan Fungsi Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta secara adapun tugas rinci.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta di Pimpin oleh Kepala Dinas. Dalam melaksanakan Tugasnya Kepala Dinas dibantu oleh Sekretaris Dinas yang membawahi 3 (tiga) Sub bagian dan 4 (empat) Kepala Bidang Yaitu ;

1. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Dan Advokasi ;
2. Kepala Bidang Keluarga Berencana;
3. Kepala Bidang Pembangunan Ketahanan Keluarga, yang masing-masing membawahi 3 (Tiga) Seksi.

4. UPTD WIL I, II, dan III.

### **1.2.2.Ketentuan tentang Perencanaan dan Penganggaran**

1. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional khususnya pasal 7 ayat (2) bahwa Renja SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKP, memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (LNRI Tahun 2004 Nomor 104,TLN Nomor 4421).
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,Tata cara Penyusunan,Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Perubahannya.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008.
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD



13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Dinas Daerah.
19. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 – 2025
20. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 239 Tahun 2021 Tentang Rincian Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta.

21. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan
22. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 88 Tahun 2023, Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
23. Peraturan Bupati Kabupaten Purwakarta Nomor 92 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 adalah selaras dengan maksud dan tujuan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2024-2026 yaitu penyediaan dokumen perencanaan pembangunan yang berisi program/kegiatan yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah(RKPD), dan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024.

Adapun tujuan penyusunannya adalah menjabarkan rencana program dan kegiatan serta menetapkan target-target kinerja dan

pendanaan indikatif tahunan sebagai bentuk komitmen organisasi bagi pencapaian kinerja yang optimal, serta sebagai arah dan acuan:

- a) Menyusun Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024;
- b) Menyusun Penilaian Kinerja Tahunan (LAKIP) Tahun 2024;
- c) Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran;
- d) Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif dan efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;
- e) Untuk menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi antara Sekretariat dan Bidang-Bidang pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta;

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Penulisan Sistematika penulisan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta adalah sebagai berikut :

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

#### **BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

- 2.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

#### **BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

#### **BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

#### **BAB V. PENUTUP**

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA TAHUN 2022**

#### **2.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 dan Capaian Renstra Dinas Pengendalian penduduk dan keluarga Berencana**

Pada Tahun 2023 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta Menerima alokasi anggaran Belanja Langsung Sebesar Rp.22.323.414.407 yang di alokasikan untuk pelaksanaan 4 program dan 16 kegiatan dengan capaian kinerja fisik sebesar 100% dan capaian kinerja keuangan sebesar Rp.8.732.059.389 Urusan Yaitu Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,

Adapun kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2022 dan 2023, antara lain :

1. Masih rendahnya tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang manfaat dan kegunaan Keluarga berencana,
2. Kurangnya tenaga pelayanan Penyuluh KB
3. Kurangnya sarana dan prasarana sebagai pendukung program Keluarga Berencana,

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja PD pencapaian perencanaan strategis (Renstra) sesuai urusan PD Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2022 s/d 2023 adalah sebagaimana tersebut dalam tabel berikut.

**Tabel 2.1**

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pencapaian Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana s.d Tahun 2022 Kabupaten Purwakarta**

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program                                                                                                  | Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018 – 2023 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021) | Target dan Realisasi Kinerja Program Tahun 2022 |                                             |                       | Target program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023 ) | Target dan Realisasi Kinerja Program Tahun berjalan 2023 |                                                |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                               |                                                                                                                            |                                                                           |                                                                                      | Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022        | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) |                                                                 | Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023                 | Realisasi Renja Perangkat Daerah II Tahun 2023 |
| 1                                                             | 2                                                                                                                          | 3                                                                         |                                                                                      | 4                                               | 5                                           | 6                     |                                                                 | 7                                                        | 8                                              |
| <b>Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran</b>    |                                                                                                                            |                                                                           |                                                                                      |                                                 |                                             |                       |                                                                 |                                                          |                                                |
|                                                               | Persentase pegawai yang memiliki kesesuaian kompetensi                                                                     | 100                                                                       | 100                                                                                  | 100                                             | 100                                         | 100                   | 100                                                             | 100                                                      | -                                              |
|                                                               | Tingkat pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan sarana/prasarana aparatur                                                     | 100                                                                       | 100                                                                                  | 100                                             | 100                                         | 100                   | 100                                                             | 100                                                      | -                                              |
|                                                               | Presentase sarana dan prasarana dalam keadaan baik                                                                         | 100                                                                       | 100                                                                                  | 100                                             | 100                                         | 100                   | 100                                                             | 100                                                      | -                                              |
|                                                               | Presentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran                                                  | 100                                                                       | 100                                                                                  | 100                                             | 100                                         | 100                   | 100                                                             | 100                                                      | -                                              |
|                                                               | Presentase perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan | 100                                                                       | 100                                                                                  | 100                                             | 100                                         | 100                   | 100                                                             | 100                                                      | -                                              |
| <b>Program Keluarga Berencana</b>                             |                                                                                                                            |                                                                           |                                                                                      |                                                 |                                             |                       |                                                                 |                                                          |                                                |
|                                                               | 1 Ratio Akseptor KB                                                                                                        | 81,27                                                                     | 81.27                                                                                | 82,27                                           | 82,27                                       | 82,27                 | 83,00                                                           | 83,00                                                    | -                                              |
|                                                               | Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS)                                                                                           | 229,476                                                                   | 229.476                                                                              | 229,476                                         | 229,476                                     | 229,476               | 230,566                                                         | 230,566                                                  | -                                              |

|                                            |                                                                                                   |       |       |       |       |       |       |       |   |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|
|                                            | 3 Persentase KB Mandiri (Cakupan PUS Menjadi Peserta KB Aktif                                     | 37,05 | 37,05 | 38,06 | 38,06 | 38,06 | 38,55 | 38,55 | - |
|                                            | 4 Cakupan PUS Yang Ingin Ber KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need                                       | 18,74 | 18,74 | 17,74 | 17,74 | 17,74 | 16,00 | 16,00 | - |
|                                            | 5 Persentase Jumlah Peserta KB Yang Dilayani                                                      | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   | - |
|                                            | 6 Peserta KB Aktif Yang Drop Out Selama Satu Tahun                                                | 17,72 | 17,72 | 17,72 | 17,72 | 17,72 | 16,00 | 16,00 | - |
|                                            | 7 Persentase PUS Muda Usia Rendah Cakupan PUS Dibawah Usia 20 th                                  | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   | - |
| <b>Program Kesehatan Reproudksi Remaja</b> |                                                                                                   |       |       |       |       |       |       |       |   |
|                                            | 1 Angka Pemakaian Kontrasepsi/C PR Bagi Perempuan Menikah Usia 15 - 49                            | 63,8  | 63,8  | 63,8  | 63,8  | 63,8  | 63,8  | 63,8  | - |
|                                            | 2 Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15-19) Per 1.000 Perempuan Usia 15-19 Tahun (ASFR 15-19) | 25,71 | 25,71 | 25,71 | 25,71 | 25,71 | 25,71 | 25,71 | - |
|                                            | 3 Rata-rata Usia Kawin Pertama Wanita                                                             | 20:24 | 25,71 | 25,71 | 25,71 | 25,71 | 20,24 | 20,24 | - |
|                                            | 4 Persentase Remaja Yang Terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)                                    |       |       |       |       |       |       |       |   |
| <b>Program pelayanan kontrasepsi</b>       |                                                                                                   |       |       |       |       |       |       |       |   |



|                                                                                    |                                                                                                             |       |       |       |       |       |       |       |   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|
|                                                                                    | 1 Persentase Peserta KB Aktif Pengguna Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)                             | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   | - |
|                                                                                    | 2 Cakupan Penyediaan Alat dan Obat Kontrasepsi Untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat Setiap Tahun            | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   | - |
|                                                                                    | 3 Efektifitas dan Efisiensi Penggunaan Alat Kontrasepsi (Alekon) Pers                                       | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | - |
| <b>Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri</b> |                                                                                                             |       |       |       |       |       |       |       |   |
|                                                                                    | 1 Persentase Jumlah PPKBD dan Sub. PPKBD (1500)                                                             | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   | - |
|                                                                                    | 2 Rasio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/ Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB) 1 Desa/Kelurahan Keluar | 1:6   | 1:6   | 1:6   | 1:6   | 1:6   | 1:6   | 1:6   | - |
|                                                                                    | 3 Ratio Pembantu Pembina Kel Berencana (PPKBD)                                                              | 1:1   | 1:1   | 1:1   | 1:1   | 1:1   | 1:1   | 1:1   | - |
|                                                                                    | 4 Persentase Data Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga                                  | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   | - |
|                                                                                    | 5 Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga Disetiap Desa/Kelurahan Setiap Tahun                     | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   | - |
| <b>Program Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga</b>                                 |                                                                                                             |       |       |       |       |       |       |       |   |
|                                                                                    | 1 Cakupan Kampung KB                                                                                        | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   | - |
|                                                                                    | 2 Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) Yang Berperan Aktif Dalam Pembangunan Daerah Melalui Kampung KB | 80,00 | 100   | 80,00 | 100   | 100   | 100   | 100   | - |

|                                                     |                                                                                                                               |       |     |       |       |     |     |     |   |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-------|-------|-----|-----|-----|---|
|                                                     | Persentase Kegiatan Penanggulangan Narkoba, PMS, HIV/AIDS                                                                     | 100   | 100 | 100   | 100   | 100 | 100 | 100 | - |
| <b>Program Penguatan Kelembagaan Keluarga Kecil</b> |                                                                                                                               |       |     |       |       |     |     |     |   |
|                                                     | 1 Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB                                                                           | 88,00 | 100 | 90,00 | 90,00 | 100 | 100 | 100 | - |
|                                                     | 2 Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB                                                                           | 86,00 | 100 | 90,00 | 90,00 | 100 | 100 | 100 | - |
|                                                     | 3 Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB                                                                           | 85,00 | 100 | 90,00 | 90,00 | 100 | 100 | 100 | - |
|                                                     | 4 Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Yang Ber-KB                          | 82,01 | 100 | 89,33 | 100   | 100 | 100 | 100 | - |
|                                                     | 5 Cakupan Kelompok Kegiatan Yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga                                       | 79,21 | 100 | 81,40 | 100   | 100 | 100 | 100 | - |
|                                                     | 6 Cakupan Keluarga Yang Mempunyai Balita dan Anak Yang Memahami dan Melaksanakan Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak | 87,00 | 100 | 90,00 | 90,00 | 100 | 100 | 100 | - |
| <b>Program Pengendalian Penduduk</b>                |                                                                                                                               |       |     |       |       |     |     |     |   |
|                                                     | 1 Cakupan Kerjasama Penyelenggara an Pendidikan Formal, Non Formal dan Informal Yang Melakukan Pendidikan Kependudukan        | 100   | 100 | 100   | 100   | 100 | 100 | 100 | - |
|                                                     | 2 Persentase Stakeholder/ Mitra Kerja dan Masyarakat Diseluruh Tingkat Wilayah Yang Mendapat Pembinaan Advokasi dan KIE       | 100   | 100 | 100   | 100   | 100 | 100 | 100 | - |

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Dalam kerangka analisis kinerja pelayanan terdapat tahapan penetapan, pengumpulan data kinerja, dan cara pengukuran kinerja. Data kinerja lazimnya dapat diperoleh melalui, yaitu data internal dan eksternal. Sedangkan penetapan indikator kinerjanya diukur secara kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.

Analisis capaian kinerja pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta dilakukan berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta yang telah tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026. Di bawah ini disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta.

**Tabel 2.2**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan**

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

| INDIKATOR KINERJA                                                                                                         | SPM/STANDAR NASIONAL                     | IKK | TARGET RENSTRA DPPKB |        |       |       | REALISASI CAPAIAN |        | PROYEKSI |       | CATATAN |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----|----------------------|--------|-------|-------|-------------------|--------|----------|-------|---------|
|                                                                                                                           |                                          |     | 2022                 | 2023   | 2024  | 2025  | 2022              | 2023   | 2024     | 2025  |         |
| 1 Persentase Pegawai Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi                                                                  | Meningkatkan drajat kesehatan masyarakat |     | 100                  | 100    | 100   | 100   | 100               | 100    | 100      | 100   |         |
| 2 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dan Sarana / Prasarana Kantor                                                  |                                          |     | 100                  | 100    | 100   | 100   | 100               | 100    | 100      | 100   |         |
| Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik                                                                        |                                          |     | 100                  | 100    | 100   | 100   | 100               | 100    | 100      | 100   |         |
| Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran                                                 |                                          |     | 100                  | 100    | 100   | 100   | 100               | 100    | 100      | 100   |         |
| Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Yang Tepat Waktu dan Sesuai Peraturan Perundangundangan |                                          |     | 100                  | 100    | 100   | 100   | 100               | 100    | 100      | 100   |         |
| Persentase Ketersediaan Data Kinerja OPD                                                                                  |                                          |     | 100                  | 100    | 100   | 100   | 100               | 100    | 100      | 100   |         |
| TFR (Angka Kelahiran Total)                                                                                               |                                          |     | 2,35                 | 2,35   | 2,33  | 2,32  | 2,35              | 2,35   | 2,33     | 2,32  |         |
| Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk            |                                          |     | 100                  | 100    | 100   | 100   | 100               | 100    | 100      | 100   |         |
| Rata-rata jumlah anak per keluarga                                                                                        |                                          |     | 37,890               | 37,890 | 36,00 | 36,00 | 37,890            | 37,890 | 37,890   | 36,00 |         |
| Persentase Stakeholder/Mitra Kerja dan Masyarakat Diseluruh Tingkat Wilayah Yang Mendapat Pembinaan Advokasi dan KIE      |                                          |     | 29,89                | 29,89  | 30,00 | 30,00 | 29,89             | 29,89  | 29,89    | 30,00 |         |
| Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)                                       |                                          |     | 65,6                 | 73,94  | 75,00 | 76,23 | 65,6              | 73,94  | 75,00    | 76,23 |         |

|                                                                                                                                              |  |  |         |         |         |         |         |         |         |         |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|
| Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)                                                                                |  |  | 33,52   | 34,05   | 35,22   | 36,30   | 33,52   | 33,52   | 34,05   | 36,30   |  |
| Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB                                    |  |  | 94,00   | 94,00   | 94,00   | 94,00   | 94,00   | 94,00   | 94,00   | 94,00   |  |
| Ratio Akseptor KB                                                                                                                            |  |  | 26717   | 25521   | 25521   | 25521   | 26717   | 26717   | 25521   | 25521   |  |
| Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49                                                                          |  |  | 81,27   | 81,27   | 83,28   | 83,28   | 81,27   | 81,27   | 81,27   | 83,28   |  |
| Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19)                                              |  |  | 25,70   | 25,71   | 25,71   | 25,71   | 25,71   | 25,71   | 25,71   | 25,71   |  |
| Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)                                                                                   |  |  | 533,83  | 533,83  | 533,83  | 533,83  | 533,83  | 533,83  | 533,83  | 533,83  |  |
| Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)                                                                                      |  |  | 35,54   | 46,24   | 46,24   | 46,24   | 35,54   | 35,54   | 46,24   | 46,24   |  |
| Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi                                                                                     |  |  | 17,72   | 17,73   | 17,78   | 17,78   | 17,72   | 17,72   | 17,73   | 17,78   |  |
| Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB                                                                                            |  |  | 681,167 | 681,167 | 681,167 | 681,167 | 681,167 | 681,167 | 681,167 | 681,167 |  |
| Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB                                                                                            |  |  | 151,153 | 151,153 | 151,153 | 151,153 | 151,153 | 151,153 | 151,153 | 151,153 |  |
| Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB                                                                                            |  |  | 623,471 | 623,471 | 624,471 | 624,471 | 623,471 | 623,471 | 623,471 | 624,471 |  |
| Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan                                                                                |  |  | 23,53   | 23,53   | 100     | 100     | 23,53   | 23,53   | 23,53   | 100     |  |
| Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa                                                                          |  |  | 51,71   | 51,71   | 100     | 100     | 51,71   | 51,71   | 51,71   | 100     |  |
| Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk |  |  | 98      | 115     | 126     | 126     | 98      | 98      | 115     | 126     |  |
| Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri                                   |  |  | 22.80   | 22.80   | 23.90   | 23.90   | 22.80   | 22.80   | 22.80   | 23.90   |  |

|                                                                                                                                                                 |  |  |         |         |         |         |         |         |         |         |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|
| Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan                                                                                            |  |  | 1:1     | 1:1     | 1:1     | 1:1     | 1:1     | 1:1     | 1:1     | 1:1     |  |
| Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat                                                              |  |  | 149,900 | 274,920 | 272,476 | 325,980 | 149,900 | 149,900 | 274,920 | 325,980 |  |
| Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan |  |  | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     |  |
| Persentase pembinaan Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)                       |  |  | 15,65   | 15,65   | 15,65   | 15,65   | 15,65   | 15,65   | 15,65   | 15,65   |  |
| Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa                                                                                                 |  |  | 3,314   | 3,314   | 3,314   | 3,314   | 3,314   | 3,314   | 3,314   | 3,314   |  |
| Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)                                                                                                    |  |  |         |         |         |         |         |         |         |         |  |
| Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga                                                                           |  |  | 15,65   | 15,65   | 15,65   | 15,65   | 15,65   | 15,65   | 15,65   | 15,65   |  |
| Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak                                     |  |  | 53.71   | 53.71   | 53.71   | 53.71   | 53.71   | 53.71   | 53.71   | 53.71   |  |
| Rata-rata usia kawin pertama wanita                                                                                                                             |  |  | 19      | 19      | 19      | 19      | 19      | 19      | 19      | 19      |  |

## 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas

### Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana

Permasalahan-Permasalahan yang di hadapai oleh perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

#### 1. Permasalahan terkait kesekretariatan :

##### 1. Belum optimalnya kualitas pelayanan informasi publik

2. Kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah
  3. Kurang Memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan perangkat daerah
2. Permasalahan terkait Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana :
1. Masih kurangnya partisipasi KB baru;
  2. Masih tingginya keluarga pra sejahtera;
  3. Usia kawin muda dan jumlah pasangan usia subur yang tidak ingin menunda kehamilan masih tinggi;
  4. Kesadaran akan pemakaian alat kontrasepsi masih rendah;
  5. Kurangnya tenaga penyuluh KB di lapangan;
  6. Masih rendahnya pemahaman dan pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga ditengah masyarakat

#### **2.4. Review Terhadap Rancangan awal RKPD**

Hasil review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2024 adalah sebagai berikut:



**Tabel 2.3**  
**Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024**  
**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PURWAKARTA**

| NO | RANCANGAN AWAL RKPD                                                                   |        |                                                                                                                                                                        |                |                | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN                                                              |        |                                                                                                                                                                        |                |                |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
|    | PROGRAM/ KEGIATAN                                                                     | LOKASI | INDIKATOR KINERJA                                                                                                                                                      | TARGET CAPAIAN | PAGU INDIKATIF | PROGRAM/ KEGIATAN                                                                     | LOKASI | INDIKATOR KINERJA                                                                                                                                                      | TARGET CAPAIAN | KEBUTUHAN      |
| 1  | 2                                                                                     | 3      | 4                                                                                                                                                                      | 5              | 6              | 7                                                                                     | 8      | 9                                                                                                                                                                      | 10             | 11             |
|    | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                 |        |                                                                                                                                                                        |                |                | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                 |        |                                                                                                                                                                        |                |                |
|    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA               |        |                                                                                                                                                                        |                | 22,655,262,469 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA               |        |                                                                                                                                                                        |                | 22,655,262,469 |
|    | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                           |        |                                                                                                                                                                        |                | 8,127,441,469  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                           |        |                                                                                                                                                                        |                | 8,127,441,469  |
|    | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      |        |                                                                                                                                                                        |                |                | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      |        |                                                                                                                                                                        |                |                |
|    | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       |        | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | 2 Dokumen      | 8.118.400      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       |        | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | 2 Dokumen      | 8.118.400      |
|    | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |        | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 laporan      | 10.293.500     | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |        | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 laporan      | 10.293.500     |
|    | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     |        | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                        | 1 laporan      | 126.268.900    | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     |        | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                        | 1 laporan      | 126.268.900    |

|  |                                                                         |  |                                                                                                                    |                |               |                                                                         |  |                                                                                    |                |               |
|--|-------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
|  | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                           |  |                                                                                                                    |                |               | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                           |  |                                                                                    |                |               |
|  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                       |  | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                  | 34 Orang/bulan | 6.428.509.310 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                       |  | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                  | 34 Orang/bulan | 6.428.509.310 |
|  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD             |  | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan      | 15.980.700    | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD             |  |                                                                                    | 1 Laporan      | 15.980.700    |
|  | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>           |  |                                                                                                                    |                |               | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>           |  |                                                                                    |                |               |
|  | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD       |  | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                                   | 4 Laporan      | 12.750.000    | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD       |  | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 4 Laporan      | 12.750.000    |
|  | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                               |  |                                                                                                                    |                |               | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                               |  |                                                                                    |                |               |
|  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor        |  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                 | 5 Item         | 35.480.000    | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor        |  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 5 Item         | 35.480.000    |
|  | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                       |  | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                                                | 8 Item         | 22.168.700    | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                       |  | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                | 8 Item         | 22.168.700    |
|  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                        |  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                 | 4 Paket        | 106.826.059   | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                        |  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                 | 4 Paket        | 106.826.059   |
|  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                 |  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                          | 7 Item         | 38.500.000    | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                 |  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          | 7 Item         | 38.500.000    |
|  | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                               |  | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                           | 2 Laporan      | 15.000.000    | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                               |  | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                           | 2 Laporan      | 15.000.000    |
|  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    |  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                | 12 bulan       | 111.461.100   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    |  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                | 12 bulan       | 111.461.100   |
|  | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> |  |                                                                                                                    |                |               | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> |  |                                                                                    |                |               |

|  |                                                                                                                     |  |                                                                                                          |            |             |                                                                                                                     |  |                                                                                                          |            |             |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
|  | Pengadaan Mebel                                                                                                     |  | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                       | 3 Unit     | 32.980.800  | Pengadaan Mebel                                                                                                     |  | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                       | 3 Unit     | 32.980.800  |
|  | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                  |  | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                     | 3 Unit     | 83.104.000  | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                  |  | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                     | 3 Unit     | 83.104.000  |
|  | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                         |  |                                                                                                          |            |             | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                         |  |                                                                                                          |            |             |
|  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                            | 1 laporan  | 5.000.000   | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                            | 1 laporan  | 5.000.000   |
|  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                   | 12 laporan | 100.000.000 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                   | 12 laporan | 100.000.000 |
|  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                     | 12 laporan | 500.000.000 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                     | 12 laporan | 500.000.000 |
|  | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                        |  |                                                                                                          |            |             | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                        |  |                                                                                                          |            |             |
|  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |  | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya   | 5 Unit     | 75.000.000  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |  | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya   | 5 Unit     | 75.000.000  |
|  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     |  | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya   | 114 Unit   | 100.000.000 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     |  | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya   | 114 Unit   | 100.000.000 |
|  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        |  | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                 | 1 Unit     | 200.000.000 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        |  | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                 | 1 Unit     | 200.000.000 |
|  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                        |  | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 36 Unit    | 100.000.000 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                        |  | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 36 Unit    | 100.000.000 |

|  |                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                       |           |                    |                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                       |           |                    |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  | <b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>                                                                                                                       |  |                                                                                                                       |           | <b>357.200.000</b> | <b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>                                                                                                                       |  |                                                                                                                       |           | <b>357.200.000</b> |
|  | <b>Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</b> |  |                                                                                                                       |           |                    | <b>Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</b> |  |                                                                                                                       |           |                    |
|  | Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota                                                             |  | Jumlah Dokumen<br>Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota      | 1 Dokumen | 25.000.000         | Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota                                                             |  | 1 Dokumen                                                                                                             |           | 25.000.000         |
|  | Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga                                                                                                     |  |                                                                                                                       | 1 Laporan | 75.000.000         | Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga                                                                                                     |  | 1 Laporan                                                                                                             |           | 75.000.000         |
|  | Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK                                                                                                               |  | Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) | 1 Laporan | 75.000.000         | Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK                                                                                                               |  | Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) | 1 Laporan | 75.000.000         |
|  | <b>Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                                              |  |                                                                                                                       |           |                    | <b>Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                                              |  | <b>100</b>                                                                                                            |           |                    |
|  | Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga                                                                                |  |                                                                                                                       | 1 Dokumen | 25.000.000         | Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga                                                                                |  | 1 Dokumen                                                                                                             |           | 25.000.000         |
|  | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga                                                                                         |  | Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga                                     | 1 Laporan | 75.000.000         | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga                                                                                         |  | Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga                                     | 1 Laporan | 75.000.000         |
|  | Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB                                                                                       |  | Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB                                   | 2 Dokumen | 82.200.000         | Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB                                                                                       |  | Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB                                   | 2 Dokumen | 82.200.000         |

|  |                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                         |                  |                      |                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                         |                  |                      |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|
|  | <b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>                                                                               |  |                                                                                                                                                                         |                  | <b>7,732,621,000</b> | <b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>                                                                               |  |                                                                                                                                                                         |                  | <b>7,732,621,000</b> |
|  | <b>Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal</b> |  |                                                                                                                                                                         |                  |                      | <b>Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal</b> |  |                                                                                                                                                                         |                  |                      |
|  | Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal                                             |  | Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal | 1 Kegiatan       | 150.000.000          | Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal                                             |  | Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal | 1 Kegiatan       | 150.000.000          |
|  | Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK                                                                             |  | Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)                               | 1 Unit           | 160.000.000          | Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK                                                                             |  | Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)                               | 1 Unit           | 160.000.000          |
|  | Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK                                                                   |  | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)                 | 9 Balai penyuluh | 79.650.000           | Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK                                                                   |  | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)                 | 9 Balai penyuluh | 79.650.000           |
|  | <b>Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</b>                                                         |  |                                                                                                                                                                         |                  |                      | <b>Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</b>                                                         |  |                                                                                                                                                                         |                  |                      |

|  |                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |               |                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |               |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|
|  | Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB                                                                                                           |  | Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB                                                                                               | 12 Kali    | 808.000.000   | Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB                                                                                                           |  | Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB                                                                                               | 12 Kali    | 808.000.000   |
|  | Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) |  | Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) | 12 Laporan | 1.500.000.000 | Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) |  | Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) | 12 Laporan | 1.500.000.000 |
|  | Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)                                                                                                                    |  | Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)                                                                                                                                                                                   | 5 Kegiatan | 550.000.000   | Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)                                                                                                                    |  | Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)                                                                                                                                                                                   | 5 Kegiatan | 550.000.000   |
|  | <b>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota</b>                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |               | <b>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota</b>                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |               |
|  | Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya                        |  | Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya                                                                                                    | 105 faskes | 96.900.000    | Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya                        |  | Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya                                                                                                    | 105 faskes | 96.900.000    |

|  |                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                       |               |                      |                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                       |               |                      |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|
|  | Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)                                                                                          |  | Terlaksananya peningkatan MKJP                                                                                                                                        | 7 jenis       | 2.149.393.000        | Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)                                                                                          |  | Terlaksananya peningkatan MKJP                                                                                                                                        | 7 jenis       | 2.149.393.000        |
|  | Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP                                                                                          |  | Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP                                                                                         | 500 Kasus     | 100.000.000          | Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP                                                                                          |  | Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP                                                                                         | 500 Kasus     | 100.000.000          |
|  | Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB                                                                                                                           |  | Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB                                                                                                                             | 1 Unit        | 861.678.000          | Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB                                                                                                                           |  | Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB                                                                                                                             | 1 Unit        | 861.678.000          |
|  | Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak                                                                                                                         |  | Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak                                                                                                             | 2 Kegiatan    | 500.000.000          | Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak                                                                                                                         |  | Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak                                                                                                             | 2 Kegiatan    | 500.000.000          |
|  | <b>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</b> |  |                                                                                                                                                                       |               |                      | <b>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</b> |  |                                                                                                                                                                       |               |                      |
|  | Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB                                 |  | Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | 6 Kegiatan    | 250.000.000          | Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB                                 |  | Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | 6 Kegiatan    | 250.000.000          |
|  | Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB                                                                                                            |  | Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB        | 34 Kampung kb | 527.000.000          | Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB                                                                                                            |  | Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB        | 34 Kampung kb | 527.000.000          |
|  | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>                                                                                                |  |                                                                                                                                                                       |               | <b>6,438,000,000</b> | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>                                                                                                |  |                                                                                                                                                                       |               | <b>6,438,000,000</b> |

|  |                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                          |            |               |                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                          |            |               |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|
|  | <b>Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>                                                                                            |  |                                                                                                                                                                          |            |               | <b>Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>                                                                                            |  |                                                                                                                                                                          |            |               |
|  | Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)                                             |  | Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)                          | 20 Unit    | 360.000.000   | Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)                                             |  | Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)                          | 20 Unit    | 360.000.000   |
|  | Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)                                       |  | Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | 5 Laporan  | 250.000.000   | Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)                                       |  | Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | 5 Laporan  | 250.000.000   |
|  | Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)              |  | Tersedianya Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)                                 | 3340 orang | 5.278.000.000 | Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)              |  | Tersedianya Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)                                 | 3340 orang | 5.278.000.000 |
|  | <b>Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b> |  |                                                                                                                                                                          |            |               | <b>Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b> |  |                                                                                                                                                                          |            |               |



|  |                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                   |              |                       |                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                   |              |                       |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|
|  | Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) |  | Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | 4 Laporan    | 250.000.000           | Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) |  | Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | 4 Laporan    | 250.000.000           |
|  | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)         |  | Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)   | 3 Organisasi | 300.000.000           | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)         |  | Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)   | 3 Organisasi | 300.000.000           |
|  |                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                   |              | <b>22,655,262,469</b> |                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                   |              | <b>22,655,262,469</b> |

## **2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Dalam perencanaan program/kegiatan OPD Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melalui dua macam perencanaan yaitu *Buttom Up* dan *Top Down*. Kegiatan Musrenbang Kecamatan yang telah didahului dengan musrenbang tingkat desa adalah untuk menampung usulan masyarakat yang akan dituangkan dalam program dan kegiatan di OPD. Pada Tahun 2024 terdapat usulan program dan kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat melalui mekanisme MUSRENBANG dan telah ditelaah oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta sebagaimana terdapat pada tabel berikut ini:

**Tabel. 2. 4**  
**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024**  
**Kabupaten Purwakarta**

**Nama Perangkat Daerah: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

| NO | Program / Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran / Volume | Catatan |
|----|--------------------|--------|-------------------|------------------|---------|
|    |                    |        |                   |                  |         |
|    |                    |        |                   |                  |         |
|    |                    |        |                   |                  |         |
|    |                    |        |                   |                  |         |
|    |                    |        |                   |                  |         |
|    |                    |        |                   |                  |         |
|    |                    |        |                   |                  |         |
|    |                    |        |                   |                  |         |
|    |                    |        |                   |                  |         |
|    |                    |        |                   |                  |         |
|    |                    |        |                   |                  |         |
|    |                    |        |                   |                  |         |
|    |                    |        |                   |                  |         |
|    |                    |        |                   |                  |         |

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

#### **3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Tahun 2021 arah kebijakan pembangunan nasional bertumpu pada 9 prioritas pembangunan yang lebih dikenal dengan Nawacita sebagaimana yang telah dicanangkan presiden. Arah kebijakan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta disesuaikan dengan Nawacita terutama cita ke enam yaitu meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa asia lainnya.

##### **3.1.1.Arah Kebijakan Nasional**

###### **a. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional**

Arah Kebijakan Strategi Nasional dalam pembangunan kependudukan dan keluarga berencana yang tertera pada buku 1 RPJM 2015-2019 dan yang akan menjadi fokus dalam pelaksanaan program kependudukan dan keluarga berencana selama lima tahun ke depan adalah:

Penguatan dan pemanduan kebijakan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang merata dan berkualitas

Penyediaan sarana dan prasarana serta jaminan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi (Alokon) yang memadai di setiap fasilitas kesehatan KB dan jejaring pelayanan serta pendayagunaan fasilitas kesehatan untuk pelayanan KB.

Peningkatan pelayanan KB dengan penggunaan MKJP dengan memberikan informasi secara berkesinambungan untuk keberlangsungan kesertaan ber-KB serta pemberian pelayanan KB lanjutan dengan pertimbangan prinsip rasional ,efektif dan efesien (REE).

Peningkatan jumlah dan penguatan kapasitas tenaga lapangan KB dan tenaga kesehatan pelayanan KB serta penguatan lembaga ditingkatkan masyarakat untuk mendukung pergerakan dan penyuluhan KB.

Advokasi program kependudukan keluarga berencana pembangunan keluarga kepada para pembuat kebijakan serta promosi dan pergerakan kepada masyarakat dalam penggunaan alat alat dan obat kontrasepsi KB

Peningkatan pengetahuan dan pemahaman kesehatan reproduksi bagi remaja melalui pendidikan sosialisai mengenai pentingnya wajib belajar 12 tahun dalam rangka pendewasaan usia perkawinan,dan

meningkatkan intensitas layanan KB bagi pasangan usia muda guna mencegah kelahiran di usia remaja.

Pembinaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga melalui kelompok kegiatan bina keluarga dalam rangka melestarikan kesertaan ber-KB dan memberikan pengaruh kepada keluarga calon akseptor untuk ber-KB

Penguatan tata kelola pembangunan kependudukan dan KB Melalui penguatan landasan hukum kelembagaan serta dan informasi kependudukan dan KB penguatan bidang KKB melalui penyediaan informasi dari hasil penelitian/kajian kependudukan keluarga berencana dan ketahanan keluarga serta peningkatan kerjasama penelitian dengan universitas terkait pengembangan program KKBPK.

### **3.2. Tujuan dan Sasaran**

Sesuai dengan Rencana Strategis Tahun 2024-2026 telah ditetapkan tujuan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta sebagai berikut :

- Tujuan : 1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Bersih, Efektif dan Akuntabel  
2. Meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat
- Sasaran : 1. Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dan keluarga berencana  
2. Meningkatkan akuntabilitas publik dan kepuasan masyarakat terhadap Penyelenggaraan pemerintah daerah

### **3.3. Program dan Kegiatan**

Permasalahan pelaksanaan program pada Tahun 2022 antara lain:

1. Perubahan prioritas pembangunan PMDN 90 Tahun 2019.
2. Pelaksanaan program/kegiatan prioritas pembangunan yang terkait PMDN 90 Tahun 2019.
3. Adanya peraturan pemerintah pusat yang menyebabkan harus dilakukan penyesuaian program/ kegiatan.

Tabel T-C.33

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
TAHUN 2024 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA  
BERENCANA KABUPATEN PURWAKARTA**

| Kode |    |   |      |   | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                                   | Indikator Kinerja                                                |                                                                                                                                                                                          |                                                                                        | Rencana Tahun 2024                                 |                        |                                                                  |                       |                      | Catatan<br>Penting                     | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                                                                  |                |                         |
|------|----|---|------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|      |    |   |      |   |                                                                                                   | Capaian Program                                                  | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                    | Hasil Kegiatan                                                                         | Lokasi<br>Output<br>Kegiatan                       | Target Capaian Kinerja |                                                                  |                       | Pagu Indikatif (Rp.) |                                        | Sumber<br>Dana                    | Target Capaian Kinerja                                           |                | Kebutuhan<br>Dana/      |
|      |    |   |      |   |                                                                                                   |                                                                  |                                                                                                                                                                                          |                                                                                        |                                                    | Progr<br>am            | Keluaran<br>Sub<br>Kegiatan                                      | Hasil<br>Kegiat<br>an |                      |                                        |                                   | Tolok Ukur                                                       | Target         | Pagu Indikatif<br>(Rp.) |
| 2    | 1  |   |      |   | URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>WAJIB YANG TIDAK<br>BERKAITAN<br>DENGAN<br>PELAYANAN DASAR              |                                                                  |                                                                                                                                                                                          |                                                                                        |                                                    |                        |                                                                  |                       |                      |                                        |                                   |                                                                  |                |                         |
| 2    | 14 |   |      |   | URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>BIDANG<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA<br>BERENCANA         |                                                                  |                                                                                                                                                                                          |                                                                                        |                                                    |                        | 22.655.262.469,00                                                |                       |                      |                                        |                                   |                                                                  | 22.977.871.968 |                         |
| 2    | 14 | 1 |      |   | PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA                        |                                                                  |                                                                                                                                                                                          |                                                                                        |                                                    |                        | 8.127.441.469,00                                                 |                       |                      |                                        |                                   |                                                                  | 8.398.932.158  |                         |
| 2    | 14 | 1 | 2.01 |   | Perencanaan,<br>Penganggaran, dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah                         |                                                                  |                                                                                                                                                                                          |                                                                                        |                                                    |                        |                                                                  |                       |                      |                                        |                                   |                                                                  | 260,000,000    |                         |
| 2    | 14 | 1 | 2.01 | 1 | Penyusunan<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat Daerah                                          | Capaian SAKIP<br>Perangkat Daerah                                | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah                                                                                                                                        | Meningkatnya<br>Kualitas<br>Perencanaan,<br>Penganggaran<br>Evaluasi Kinerja<br>Daerah |                                                    | B Opini                | 1<br>Dokumen                                                     | 100 %                 | 8.118.400,00         | PENDAPAT<br>AN ASLI<br>DAERAH<br>(PAD) |                                   | Capaian SAKIP<br>Perangkat Daerah                                | B Opini        | 8.118.400               |
|      |    |   |      |   |                                                                                                   | Persentase<br>Pemenuhan<br>Penunjang<br>Pelayanan<br>Perkantoran |                                                                                                                                                                                          |                                                                                        | 100 %                                              | 100 %                  | Persentase<br>Pemenuhan<br>Penunjang<br>Pelayanan<br>Perkantoran |                       |                      |                                        |                                   | 100 %                                                            |                |                         |
| 2    | 14 | 1 | 2.01 | 6 | Koordinasi dan<br>Penyusunan Laporan<br>Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD | Capaian SAKIP<br>Perangkat Daerah                                | Jumlah Laporan Capaian<br>Kinerja dan Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD dan Laporan<br>Hasil Koordinasi Penyusunan<br>Laporan Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi Kinerja<br>SKPD | Meningkatnya<br>Kualitas<br>Perencanaan,<br>Penganggaran<br>Evaluasi Kinerja<br>Daerah |                                                    | B Opini                | 1 laporan                                                        | 100 %                 | 10.293.500,00        | PENDAPA<br>TAN ASLI<br>DAERAH<br>(PAD) |                                   | Capaian SAKIP<br>Perangkat Daerah                                | B Opini        | 10.293.500              |
|      |    |   |      |   |                                                                                                   | Persentase<br>Pemenuhan<br>Penunjang<br>Pelayanan<br>Perkantoran |                                                                                                                                                                                          |                                                                                        | 100 %                                              | 100 %                  | Persentase<br>Pemenuhan<br>Penunjang<br>Pelayanan<br>Perkantoran |                       |                      |                                        |                                   | 100 %                                                            |                |                         |
| 2    | 14 | 1 | 2.01 | 7 | Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah                                                              | Capaian SAKIP<br>Perangkat Daerah                                | Jumlah Laporan Evaluasi<br>Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                      | Meningkatnya<br>Kualitas<br>Perencanaan,<br>Penganggaran<br>Evaluasi Kinerja<br>Daerah |                                                    | B Opini                | 4 Laporn                                                         | 100 %                 | 126.268.900,00       | PENDAPA<br>TAN ASLI<br>DAERAH<br>(PAD) |                                   | Capaian SAKIP<br>Perangkat Daerah                                | B Opini        | 126.268.900             |
|      |    |   |      |   |                                                                                                   | Persentase<br>Pemenuhan<br>Penunjang<br>Pelayanan<br>Perkantoran |                                                                                                                                                                                          |                                                                                        | Terlaksananya Evaluasi<br>Kinerja Perangkat Daerah | 100 %                  | 100 %                                                            |                       |                      |                                        |                                   | Persentase<br>Pemenuhan<br>Penunjang<br>Pelayanan<br>Perkantoran | 100 %          |                         |

*Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024*

*Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Purwakarta*



|   |    |   |      |   |                                                                   |                                                      |                                                                                  |                                                                            |  |                                                      |                 |       |                  |                              |                              |                                |                                |               |            |
|---|----|---|------|---|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------|-----------------|-------|------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------|------------|
| 2 | 14 | 1 | 2.02 |   | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                            |                                                      |                                                                                  |                                                                            |  |                                                      |                 |       |                  |                              |                              |                                |                                |               |            |
| 2 | 14 | 1 | 2.02 | 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                 | Capaian SAKIP Perangkat Daerah                       | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                | Meningkatnya Pengelolaan dan Pelayanan Administrasi Keuangan Daerah        |  | B Opini                                              | 34 Orang /bulan | 100 % | 6.428.509.310,00 | Dana Perimbangan             |                              | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | B Opini                        | 6.700.000.000 |            |
|   |    |   |      |   |                                                                   | Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran |                                                                                  |                                                                            |  | Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran |                 |       |                  |                              |                              | 100 %                          |                                |               |            |
| 2 | 14 | 1 | 2.02 | 5 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD       | Capaian SAKIP Perangkat Daerah                       |                                                                                  | Meningkatnya Pengelolaan dan Pelayanan Administrasi Keuangan Daerah        |  | B Opini                                              | 1 Laporan       | 100 % | 15.980.700,00    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                              | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | B Opini                        | 15.980.700    |            |
|   |    |   |      |   |                                                                   | Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran |                                                                                  |                                                                            |  | Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran |                 |       |                  |                              |                              | 100 %                          |                                |               |            |
|   |    |   |      |   |                                                                   |                                                      |                                                                                  |                                                                            |  |                                                      |                 |       |                  |                              |                              |                                |                                |               |            |
| 2 | 14 | 1 | 2.03 |   | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah            |                                                      |                                                                                  |                                                                            |  |                                                      |                 |       |                  |                              |                              |                                |                                |               |            |
| 2 | 14 | 1 | 2.03 | 5 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Capaian SAKIP Perangkat Daerah                       | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah |  | B Opini                                              | 4 Laporan       | 100 % | 12.750.000,00    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                              | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | B Opini                        | 12.750.000    |            |
|   |    |   |      |   |                                                                   | Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perkantoran |                                                                                  |                                                                            |  | Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perkantoran |                 |       |                  |                              |                              | 100 %                          |                                |               |            |
| 2 | 14 | 1 | 2.06 |   | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                |                                                      |                                                                                  |                                                                            |  |                                                      |                 |       |                  |                              |                              |                                |                                |               |            |
| 2 | 14 | 1 | 2.06 | 1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  | Capaian SAKIP Perangkat Daerah                       |                                                                                  | Meningkatnya Pengelolaan dan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat daerah  |  | B Opini                                              | 100 Persen      | 100 % | 100 %            | 35.480.000,00                | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                                | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | B Opini       | 35.480.000 |
|   |    |   |      |   |                                                                   | Persentase Pemunuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran |                                                                                  |                                                                            |  | Persentase Pemunuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran |                 |       |                  |                              |                              |                                | 100 %                          |               |            |
|   |    |   |      |   |                                                                   | Persentase Pemunuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran |                                                                                  |                                                                            |  | Persentase Pemunuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran |                 |       |                  |                              |                              |                                | 100 %                          |               |            |
| 2 | 14 | 1 | 2.06 | 3 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                 | Capaian SAKIP Perangkat Daerah                       |                                                                                  | Meningkatnya Pengelolaan dan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat daerah  |  | B Opini                                              | 100 Persen      | 100 % | 100 %            | 22.168.700,00                | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                                | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | B Opini       | 22.168.700 |
|   |    |   |      |   |                                                                   | Persentase Pemunuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran |                                                                                  |                                                                            |  | Persentase Pemunuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran |                 |       |                  |                              |                              |                                | 100 %                          |               |            |
| 2 | 14 | 1 | 2.06 | 4 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                  | Capaian SAKIP Perangkat Daerah                       | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                               | Meningkatnya Pengelolaan dan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat daerah  |  | B Opini                                              | 4 Paket         | 100 % | 106.826.059,00   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                              | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | B Opini                        | 106.826.058   |            |
|   |    |   |      |   |                                                                   | Persentase Pemunuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran |                                                                                  |                                                                            |  | Persentase Pemunuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran |                 |       |                  |                              |                              | 100 Persen                     |                                |               |            |
| 2 | 14 | 1 | 2.06 | 5 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                           | Capaian SAKIP Perangkat Daerah                       |                                                                                  | Meningkatnya Pengelolaan dan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat daerah  |  | B Opini                                              | 100 Persen      | 100 % | 100 %            | 38.500.000,00                | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                                | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | B Opini       | 38.500.000 |
|   |    |   |      |   |                                                                   | Persentase Pemunuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran |                                                                                  |                                                                            |  | Persentase Pemunuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran |                 |       |                  |                              |                              |                                | 100 Persen                     |               |            |
| 2 | 14 | 1 | 2.06 | 8 | Fasilitasi Kunjungan                                              | Capaian SAKIP                                        | Jumlah Laporan Fasilitasi                                                        | Meningkatnya                                                               |  | B Opini                                              |                 | 100 % | 15.000.000,00    | PENDAPATAN                   |                              | Capaian SAKIP                  | B Opini                        | 15.000.000    |            |

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Purwakarta

|   |    |   |      |    |                                                                              |                                                      |                                                                                        |                                                                                |            |            |       |             |                              |  |                                                      |         |             |
|---|----|---|------|----|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|-------------|------------------------------|--|------------------------------------------------------|---------|-------------|
|   |    |   |      |    | Tamu                                                                         | Perangkat Daerah                                     | Kunjungan Tamu                                                                         | Pengelolaan dan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat daerah                   |            | 2Laporan   |       |             | TAN ASLI DAERAH (PAD)        |  | Perangkat Daerah                                     |         |             |
|   |    |   |      |    |                                                                              | Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran |                                                                                        |                                                                                | 100 Persen |            |       |             |                              |  | Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran | 100 %   |             |
| 2 | 14 | 1 | 2.06 | 9  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         | Capaian SAKIP Perangkat Daerah                       | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | Meningkatnya Pengelolaan dan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat daerah      | B Opini    | 12bulan    | 100 % | 111.461.100 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  | Capaian SAKIP Perangkat Daerah                       | B Opini | 111.461.100 |
|   |    |   |      |    |                                                                              | Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran |                                                                                        |                                                                                | 100 %      |            |       |             |                              |  | Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran | 100 %   |             |
| 2 | 14 | 1 | 2.07 |    | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>    |                                                      |                                                                                        |                                                                                |            |            |       |             |                              |  |                                                      |         |             |
| 2 | 14 | 1 | 2.07 | 5  | Pengadaan Mebel                                                              | Capaian SAKIP Perangkat Daerah                       | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                     | Meningkatnya pengelolaan dan pelayanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah | B Opini    | 3 Unit     | 100 % | 32.980.800  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  | Capaian SAKIP Perangkat Daerah                       | B Opini | 32.980.800  |
|   |    |   |      |    |                                                                              | Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran |                                                                                        |                                                                                | 100 %      |            |       |             |                              |  | Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran | 100 %   |             |
| 2 | 14 | 1 | 2.07 | 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya           | Capaian SAKIP Perangkat Daerah                       | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan   | Meningkatnya pengelolaan dan pelayanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah | B Opini    | 3 Unit     | 100 % | 83.104.000  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  | Capaian SAKIP Perangkat Daerah                       | B Opini | 83.104.000  |
|   |    |   |      |    |                                                                              | Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran |                                                                                        |                                                                                | 100 %      |            |       |             |                              |  | Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran | 100 %   |             |
| 2 | 14 | 1 | 2.08 |    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                  |                                                      |                                                                                        |                                                                                |            |            |       |             |                              |  |                                                      |         |             |
| 2 | 14 | 1 | 2.08 | 1  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                               | Capaian SAKIP Perangkat Daerah                       | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          | Meningkatnya pengelolaan dan pelayanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah | B Opini    | 1 Laporan  | 100 % | 5.000.000   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  | Capaian SAKIP Perangkat Daerah                       | B Opini | 5.000.000   |
|   |    |   |      |    |                                                                              | Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran |                                                                                        |                                                                                | 100 %      |            |       |             |                              |  | Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran | 100 %   |             |
| 2 | 14 | 1 | 2.08 | 2  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                      | Capaian SAKIP Perangkat Daerah                       | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Meningkatnya pengelolaan dan pelayanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah | B Opini    | 12 Laporan | 100 % | 100.000.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  | Capaian SAKIP Perangkat Daerah                       | B Opini | 100.000.000 |
|   |    |   |      |    |                                                                              | Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran |                                                                                        |                                                                                | 100 %      |            |       |             |                              |  | Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran | 100 %   |             |
| 2 | 14 | 1 | 2.08 | 4  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                        | Capaian SAKIP Perangkat Daerah                       | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | Meningkatnya pengelolaan dan pelayanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah | B Opini    | 12 Laporan | 100 % | 500.000.000 | Dana Perimbangan             |  | Capaian SAKIP Perangkat Daerah                       | B Opini | 500.000.000 |
|   |    |   |      |    |                                                                              | Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran |                                                                                        |                                                                                | 100 %      |            |       |             |                              |  | Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran | 100 %   |             |
| 2 | 14 | 1 | 2.09 |    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> |                                                      |                                                                                        |                                                                                |            |            |       |             |                              |  |                                                      |         |             |
| 2 | 14 | 1 | 2.09 | 1  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya                                          | Cakupan SAKIP Perangkat Daerah                       | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau                                                 | Meningkatnya Kualitas Aset                                                     | B Opini    | 5 Unit     | 100 % | 75.000.000  | PENDAPATAN ASLI              |  | Cakupan SAKIP Perangkat Daerah                       | B Opini | 75.000.000  |

|   |    |   |      |    |                                                                                                                                                     |                                                                                                                      |                                                                                                               |                                                                                                               |       |         |           |       |             |                              |  |                                                                                                                      |         |             |
|---|----|---|------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------|-------|-------------|------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|
|   |    |   |      |    | Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                                                     | Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran                                                                 | Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                                               | Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah                                                                         |       | 100 %   |           |       |             | DAERAH (PAD)                 |  | Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran                                                                 | 100 %   |             |
| 2 | 14 | 1 | 2.09 | 2  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                     | Cakupan SAKIP Perangkat Daerah                                                                                       | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya        | Meningkatnya Kualitas Aset Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah                                              |       | B Opini | 114 Unit  | 100 % | 100.000.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  | Cakupan SAKIP Perangkat Daerah                                                                                       | B Opini | 100.000.000 |
|   |    |   |      |    |                                                                                                                                                     | Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran                                                                 |                                                                                                               |                                                                                                               |       | 100 %   |           |       |             |                              |  | Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran                                                                 | 100 %   |             |
|   |    |   |      |    |                                                                                                                                                     | Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran                                                                 |                                                                                                               |                                                                                                               |       | 100 %   |           |       |             |                              |  | Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran                                                                 | 100 %   |             |
| 2 | 14 | 1 | 2.09 | 9  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                        | Cakupan SAKIP Perangkat Daerah                                                                                       | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                      | Meningkatnya Kualitas Aset Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah                                              |       | B Opini | 1 Unit    | 100 % | 200.000.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  | Cakupan SAKIP Perangkat Daerah                                                                                       | B Opini | 200.000.000 |
|   |    |   |      |    |                                                                                                                                                     | Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran                                                                 |                                                                                                               |                                                                                                               |       | 100 %   |           |       |             |                              |  | Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran                                                                 | 100 %   |             |
| 2 | 14 | 1 | 2.09 | 11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                        | Cakupan SAKIP Perangkat Daerah                                                                                       | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi      | Meningkatnya Kualitas Aset Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah                                              |       | B Opini | 36 Unit   | 100 % | 100.000.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  | Cakupan SAKIP Perangkat Daerah                                                                                       | B Opini | 100.000.000 |
|   |    |   |      |    |                                                                                                                                                     | Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran                                                                 |                                                                                                               |                                                                                                               |       | 100 %   |           |       |             |                              |  | Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran                                                                 | 100 %   |             |
| 2 | 14 | 2 |      |    | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK                                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                               |                                                                                                               |       |         |           |       | 357.200.000 |                              |  |                                                                                                                      |         | 357.200.000 |
| 2 | 14 | 2 | 2.01 |    | Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk |                                                                                                                      |                                                                                                               |                                                                                                               |       |         |           |       |             |                              |  |                                                                                                                      |         |             |
|   |    |   |      |    |                                                                                                                                                     | Persentase Stakeholder/Mitra Kerja dan Masyarakat Diseluruh Tingkat Wilayah Yang Mendapat Pembinaan Advokasi dan KIE |                                                                                                               |                                                                                                               |       | 100 %   |           |       |             |                              |  | Persentase Stakeholder/Mitra Kerja dan Masyarakat Diseluruh Tingkat Wilayah Yang Mendapat Pembinaan Advokasi dan KIE | 100 %   |             |
| 2 | 14 | 2 | 2.01 | 2  | Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota                                                      | Cakupan Kerjasama Penyelenggaraan Pendidikan Formal, Non Formal dan Informal Yang Melakukan Pendidikan Kependudukan  | Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota | Meningkatnya pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota1 | 100 % | 100 %   | 1 Dokumen | 100 % | 25.000.000  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  | Cakupan Kerjasama Penyelenggaraan Pendidikan Formal, Non Formal dan Informal Yang Melakukan Pendidikan Kependudukan  | 100 %   | 25.000.000  |

|   |    |   |          |        |                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                               |       |           |           |       |            |                              |  |                                                                                                                      |           |            |
|---|----|---|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|-------|------------|------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
|   |    |   |          |        |                                                                               | Persentase Stakeholder/Mitra Kerja dan Masyarakat Diseluruh Tingkat Wilayah Yang Mendapat Pembinaan Advokasi dan KIE |                                                                                                                       |                                                                                                               |       | 100 %     |           |       |            |                              |  | Persentase Stakeholder/Mitra Kerja dan Masyarakat Diseluruh Tingkat Wilayah Yang Mendapat Pembinaan Advokasi dan KIE | 100 %     |            |
|   |    |   |          |        |                                                                               | Persentase Stakeholder/Mitra Kerja dan Masyarakat Diseluruh Tingkat Wilayah Yang Mendapat Pembinaan Advokasi dan KIE |                                                                                                                       |                                                                                                               |       | 100 %     |           |       |            |                              |  | Persentase Stakeholder/Mitra Kerja dan Masyarakat Diseluruh Tingkat Wilayah Yang Mendapat Pembinaan Advokasi dan KIE | 100 %     |            |
| 2 | 14 | 2 | 2.0<br>1 | 1<br>4 | Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga                        | Cakupan Kerjasama Penyelenggaraan Pendidikan Formal, Non Formal dan Informal Yang Melakukan Pendidikan Kependudukan  |                                                                                                                       | Meningkatnya pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota1 | 100 % | 100 %     | 100 %     | 100 % | 75.000.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  | Cakupan Kerjasama Penyelenggaraan Pendidikan Formal, Non Formal dan Informal Yang Melakukan Pendidikan Kependudukan  | 100 %     | 75.000.000 |
|   |    |   |          |        |                                                                               | Persentase Stakeholder/Mitra Kerja dan Masyarakat Diseluruh Tingkat Wilayah Yang Mendapat Pembinaan Advokasi dan KIE |                                                                                                                       |                                                                                                               |       | 100 %     |           |       |            |                              |  | Persentase Stakeholder/Mitra Kerja dan Masyarakat Diseluruh Tingkat Wilayah Yang Mendapat Pembinaan Advokasi dan KIE | 100 %     |            |
| 2 | 14 | 2 | 2.0<br>1 | 1<br>5 | Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK                                  | Cakupan Kerjasama Penyelenggaraan Pendidikan Formal, Non Formal dan Informal Yang Melakukan Pendidikan Kependudukan  | Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) | Meningkatnya pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota1 | 100 % | 100 %     | 1 Laporan | 100 % | 75.000.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  | Cakupan Kerjasama Penyelenggaraan Pendidikan Formal, Non Formal dan Informal Yang Melakukan Pendidikan Kependudukan  | 1 Laporan | 75.000.000 |
|   |    |   |          |        |                                                                               | Persentase Stakeholder/Mitra Kerja dan Masyarakat Diseluruh Tingkat Wilayah Yang Mendapat Pembinaan Advokasi dan KIE |                                                                                                                       |                                                                                                               |       | 100 %     |           |       |            |                              |  | Persentase Stakeholder/Mitra Kerja dan Masyarakat Diseluruh Tingkat Wilayah Yang Mendapat Pembinaan Advokasi dan KIE | 100 %     |            |
| 2 | 14 | 2 | 2.0<br>2 |        | <b>Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b> |                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                               |       |           |           |       |            |                              |  |                                                                                                                      |           |            |
| 2 | 14 | 2 | 2.0<br>2 | 3      | Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga   | Cakupan Kerjasama Penyelenggaraan Pendidikan Formal, Non Formal dan Informal Yang Melakukan Pendidikan               |                                                                                                                       | Meningkatnya pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah kabupaten/kota                           | 100 % | 1 Dokumen |           | 100 % | 25.000.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  | Cakupan Kerjasama Penyelenggaraan Pendidikan Formal, Non Formal dan Informal Yang Melakukan Pendidikan               | 1 Dokumen | 25.000.000 |

|   |    |   |          |        |                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                     |  |       |              |       |                      |                              |  |                                                                                                                      |       |                      |
|---|----|---|----------|--------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|--------------|-------|----------------------|------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|
|   |    |   |          |        |                                                                      | Kependudukan                                                                                                         |                                                                                     |  |       |              |       |                      |                              |  | Kependudukan                                                                                                         |       |                      |
|   |    |   |          |        |                                                                      | Persentase Stakeholder/Mitra Kerja dan Masyarakat Diseluruh Tingkat Wilayah Yang Mendapat Pembinaan Advokasi dan KIE |                                                                                     |  | 100 % |              |       |                      |                              |  | Persentase Stakeholder/Mitra Kerja dan Masyarakat Diseluruh Tingkat Wilayah Yang Mendapat Pembinaan Advokasi dan KIE | 100 % |                      |
|   |    |   |          |        |                                                                      | Persentase Stakeholder/Mitra Kerja dan Masyarakat Diseluruh Tingkat Wilayah Yang Mendapat Pembinaan Advokasi dan KIE |                                                                                     |  | 100 % |              |       |                      |                              |  | Persentase Stakeholder/Mitra Kerja dan Masyarakat Diseluruh Tingkat Wilayah Yang Mendapat Pembinaan Advokasi dan KIE | 100 % |                      |
| 2 | 14 | 2 | 2.0<br>2 | 9      | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga   | Cakupan Kerjasama Penyelenggaraan Pendidikan Formal, Non Formal dan Informal Yang Melakukan Pendidikan Kependudukan  | Meningkatnya pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah kabupaten/kota |  | 100 % | 100 %        | 100 % | 75.000.000           | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  | Cakupan Kerjasama Penyelenggaraan Pendidikan Formal, Non Formal dan Informal Yang Melakukan Pendidikan Kependudukan  | 100 % | 75.000.000           |
|   |    |   |          |        |                                                                      | Persentase Stakeholder/Mitra Kerja dan Masyarakat Diseluruh Tingkat Wilayah Yang Mendapat Pembinaan Advokasi dan KIE |                                                                                     |  | 100 % |              |       |                      |                              |  | Persentase Stakeholder/Mitra Kerja dan Masyarakat Diseluruh Tingkat Wilayah Yang Mendapat Pembinaan Advokasi dan KIE | 100 % |                      |
| 2 | 14 | 2 | 2.0<br>2 | 1<br>3 | Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB | Cakupan Kerjasama Penyelenggaraan Pendidikan Formal, Non Formal dan Informal Yang Melakukan Pendidikan Kependudukan  | Meningkatnya pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah kabupaten/kota |  | 100 % | 2<br>Dokumen | 100 % | 82.200.000           | DAK Non Fisik- BOKB-KB       |  | Cakupan Kerjasama Penyelenggaraan Pendidikan Formal, Non Formal dan Informal Yang Melakukan Pendidikan Kependudukan  | 100 % | 82.200.000           |
|   |    |   |          |        |                                                                      | Persentase Stakeholder/Mitra Kerja dan Masyarakat Diseluruh Tingkat Wilayah Yang Mendapat Pembinaan Advokasi dan KIE |                                                                                     |  | 100 % |              |       |                      |                              |  | Persentase Stakeholder/Mitra Kerja dan Masyarakat Diseluruh Tingkat Wilayah Yang Mendapat Pembinaan Advokasi dan KIE | 100 % |                      |
| 2 | 14 | 3 |          |        | <b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>                     |                                                                                                                      |                                                                                     |  |       |              |       | <b>7.732.621.000</b> |                              |  |                                                                                                                      |       | <b>7.732.621.000</b> |
| 2 | 14 | 3 | 2.0<br>1 |        | <b>Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)</b> |                                                                                                                      |                                                                                     |  |       |              |       |                      |                              |  |                                                                                                                      |       |                      |

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Purwakarta

|          |           |          |                  |   |                                                                                                                                                                           |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                       |  |      |            |       |               |                              |  |                                                           |      |               |
|----------|-----------|----------|------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|------------|-------|---------------|------------------------------|--|-----------------------------------------------------------|------|---------------|
|          |           |          |                  |   | <b>Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal</b>                                                                                                          |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                       |  |      |            |       |               |                              |  |                                                           |      |               |
| 2        | 14        | 3        | 2.0<br>1         | 2 | Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa kencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal                                                                               | Cakupan pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif | Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal                                                                                              | Meningkatnya pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian dan KB Sesuai |  | 87 % | 1 kegiatan | 100 % | 150.000.000   | DAK Non Fisik- BOKB-KB       |  | Cakupan pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif | 87 % | 150.000.000   |
| 2        | 14        | 3        | 2.0<br>1         | 3 | Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK                                                                                                                        | Cakupan pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif | Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)                                                                                                                            | Meningkatnya pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian dan KB Sesuai |  | 87 % | 1 Unit     | 100 % | 160.000.000   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  | Cakupan pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif | 87 % | 160.000.000   |
| 2        | 14        | 3        | 2.0<br>1         | 7 | Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK                                                                                                              | Cakupan pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)                                                                                                              | Meningkatnya pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian dan KB Sesuai |  | 87 % | 9 Balai    | 100 % | 79.650.000    | DAK Non Fisik- BOKB-KB       |  | Cakupan pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif | 87 % | 79.650.000    |
| <b>2</b> | <b>14</b> | <b>3</b> | <b>2.0<br/>2</b> |   | <b>Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</b>                                                                                                    |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                       |  |      |            |       |               |                              |  |                                                           |      |               |
| 2        | 14        | 3        | 2.0<br>2         | 1 | Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB                                                                                                            | Cakupan pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif | Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB                                                                                                | Meningkatnya Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan                                        |  | 87 % | 12 Kali    | 100 % | 808.000.000   | DAK Non Fisik- BOKB-KB       |  | Cakupan pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif | 87 % | 808.000.000   |
| 2        | 14        | 3        | 2.0<br>2         | 3 | Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) | Cakupan pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif | Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) | Meningkatnya Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan                                        |  | 87 % | 12 Laporan | 100 % | 1.500.000.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  | Cakupan pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif | 87 % | 1.500.000.000 |
| 2        | 14        | 3        | 2.0<br>2         | 4 | Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)                                                                                                                     | Cakupan pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif | Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)                                                                                                                                                                                    | Meningkatnya Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan                                        |  | 87 % | 5 kegiatan | 100 % | 550.000.000   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  | Cakupan pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif | 87 % | 550.000.000   |

|   |    |   |          |        |                                                                                                                                                             |                                                           |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |      |            |       |               |                                              |  |                                                           |      |               |  |
|---|----|---|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|-------|---------------|----------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------|------|---------------|--|
| 2 | 14 | 3 | 2.0<br>3 |        | Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota                                |                                                           |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |      |            |       |               |                                              |  |                                                           |      |               |  |
| 2 | 14 | 3 | 2.0<br>3 | 1      | Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya           | Cakupan pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif | Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | Meningkatnya Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi dan pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan | 87 % | 150 faskes | 100 % | 96.900.000    | DAK Non Fisik-BOKB-KB                        |  | Cakupan pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif | 87 % | 96.900.000    |  |
| 2 | 14 | 3 | 2.0<br>3 | 3      | Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)                                                                                   | Cakupan pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif | Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)                                                                        | Meningkatnya Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi dan pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan | 87 % | 7 Jenis    | 100 % | 2.149.393.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                 |  | Cakupan pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif | 87 % | 2.149.393.000 |  |
|   |    |   |          |        |                                                                                                                                                             |                                                           | Terlaksananya peningkatan MKJP                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |      | 100 %      |       |               |                                              |  |                                                           |      |               |  |
| 2 | 14 | 3 | 2.0<br>3 | 4      | Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP                                                                                   | Cakupan pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif | Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP                                                                                    | Meningkatnya Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi dan pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan | 87 % | 500 kasus  | 100 % | 100.000.000   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                 |  | Cakupan pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif | 87 % | 100.000.000   |  |
| 2 | 14 | 3 | 2.0<br>3 | 6      | Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB                                                                                                                    | Cakupan pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif | Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB                                                                                                                        | Meningkatnya Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi dan pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan | 87 % | 1 Unit     | 100 % | 861.678.000   | DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB |  | Cakupan pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif | 87 % | 861.678.000   |  |
| 2 | 14 | 3 | 2.0<br>3 | 1<br>1 | Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak                                                                                                                  | Cakupan pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif | Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak                                                                                                        | Meningkatnya Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi dan pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan | 87 % | 2 kegiatan | 100 % | 500.000.000   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                 |  | Cakupan pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif | 87 % | 500.000.000   |  |
| 2 | 14 | 3 | 2.0<br>4 |        | Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB |                                                           |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |      |            |       |               |                                              |  |                                                           |      |               |  |

|   |    |   |          |   |                                                                                                                                                                              |                                                                                                              |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |       |               |       |                      |                                              |                                                                                                              |       |                      |
|---|----|---|----------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|-------|----------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|
| 2 | 14 | 3 | 2.0<br>4 | 1 | Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB                                           | Cakupan pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif                                                    | Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB    | Meningkatnya pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah dan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan | 87 %  | 6 kegiatan    | 100 % | 250.000.000          | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                 | Cakupan pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif                                                    | 87 %  | 250.000.000          |
| 2 | 14 | 3 | 2.0<br>4 | 3 | Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBP di Kampung KB                                                                                                                       | Cakupan pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif                                                    | Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB           | Meningkatnya pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah dan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan | 87 %  | 34 Kampung kb | 100 % | 527.000.000          | DAK Non Fisik-BOKB-KB                        | Cakupan pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif                                                    | 87 %  | 527.000.000          |
| 2 | 14 | 4 |          |   | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>                                                                                                          |                                                                                                              |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |       |               |       | <b>6.438.000.000</b> |                                              |                                                                                                              |       | <b>6.489.118.810</b> |
| 2 | 14 | 4 | 2.0<br>1 |   | <b>Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>                                                                               |                                                                                                              |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |       |               |       |                      |                                              |                                                                                                              |       | <b>5.995.000.000</b> |
| 2 | 14 | 4 | 2.0<br>1 | 2 | Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)                                | Persentase partisipasi kelompok tribina dan UPPKS dalam ketahanan keluarga dan pemberdayaan ekonomi keluarga | Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)                          | Meningkatnya pelaksanaan pembangunan keluarga                                                                                                        | 100 % | 20 Unit       | 100 % | 360.000.000          | DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB | Persentase partisipasi kelompok tribina dan UPPKS dalam ketahanan keluarga dan pemberdayaan ekonomi keluarga | 100 % | 360.000.000          |
| 2 | 14 | 4 | 2.0<br>1 | 3 | Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)                          | Persentase partisipasi kelompok tribina dan UPPKS dalam ketahanan keluarga dan pemberdayaan ekonomi keluarga | Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | Meningkatnya pelaksanaan pembangunan keluarga                                                                                                        | 100 % | 5 Laporan     | 100 % | 250.000.000          | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                 | Persentase partisipasi kelompok tribina dan UPPKS dalam ketahanan keluarga dan pemberdayaan ekonomi keluarga | 100 % | 250.000.000          |
| 2 | 14 | 4 | 2.0<br>1 | 5 | Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | Persentase partisipasi kelompok tribina dan UPPKS dalam ketahanan keluarga dan pemberdayaan ekonomi keluarga | Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)                  | Meningkatnya pelaksanaan pembangunan keluarga                                                                                                        | 100 % | 3340 Orang    | 100 % | 5.278.000.000        | DAK Non Fisik-BOKB-KB                        | Persentase partisipasi kelompok tribina dan UPPKS dalam ketahanan keluarga dan pemberdayaan ekonomi keluarga | 100 % | 5.278.000.000        |
|   |    |   |          |   |                                                                                                                                                                              |                                                                                                              | Tersedianya Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)                                 |                                                                                                                                                      |       |               |       |                      |                                              |                                                                                                              |       |                      |



|              |    |   |          |   |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                |  |       |              |       |                       |                              |                                                                                                              |       |                       |
|--------------|----|---|----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|--------------|-------|-----------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|
| 2            | 14 | 4 | 2.0<br>2 |   | <b>Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>                          |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                |  |       |              |       |                       |                              |                                                                                                              |       |                       |
| 2            | 14 | 4 | 2.0<br>2 | 2 | Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | Persentase partisipasi kelompok tribina dan UPPKS dalam ketahanan keluarga dan pemberdayaan ekonomi keluarga | Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | Meningkatnya pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga |  | 100 % | 4 Laporan    | 100 % | 250.000.000           | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Persentase partisipasi kelompok tribina dan UPPKS dalam ketahanan keluarga dan pemberdayaan ekonomi keluarga | 100 % | 275.559.405           |
| 2            | 14 | 4 | 2.0<br>2 | 3 | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)         | Persentase partisipasi kelompok tribina dan UPPKS dalam ketahanan keluarga dan pemberdayaan ekonomi keluarga | Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)   | Meningkatnya pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga |  | 100 % | 3 organisasi | 100 % | 300.000.000           | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Persentase partisipasi kelompok tribina dan UPPKS dalam ketahanan keluarga dan pemberdayaan ekonomi keluarga | 100 % | 325.559.405           |
| <b>TOTAL</b> |    |   |          |   |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                |  |       |              |       | <b>22.655.262.469</b> |                              |                                                                                                              |       | <b>22.977.871.968</b> |

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Bab ini menyajikan rumusan program dan kegiatan beserta indikator Kinerja dan pagu indikatif, yang disajikan dalam tabel 4.1, sebagai berikut :

**Tabel T-C 34**

**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

**DINAS PENGENDALIAN**

**PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PURWAKARTA**

| Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                                   | Indikator Kinerja                                       |                                                                                                                                                                        |                                                                                  | Rencana Tahun 2024        |                        |                          |                |                      |                                    | Catatan<br>Penting |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------------|----------------|----------------------|------------------------------------|--------------------|
|                                                                                                   | Capaian Program                                         | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                  | Hasil Kegiatan                                                                   | Lokasi Output<br>Kegiatan | Target Capaian Kinerja |                          |                | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana                        |                    |
|                                                                                                   |                                                         |                                                                                                                                                                        |                                                                                  |                           | Program                | Keluaran Sub<br>Kegiatan | Hasil Kegiatan |                      |                                    |                    |
| URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>WAJIB YANG TIDAK<br>BERKAITAN DENGAN<br>PELAYANAN DASAR                 |                                                         |                                                                                                                                                                        |                                                                                  |                           |                        |                          |                |                      |                                    |                    |
| URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>BIDANG<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA<br>BERENCANA         |                                                         |                                                                                                                                                                        |                                                                                  |                           |                        |                          |                | 22.655.262.469,00    |                                    |                    |
| PROGRAM<br>PENUNJANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/ KOTA                          |                                                         |                                                                                                                                                                        |                                                                                  |                           |                        |                          |                | 8.127.441.469,00     |                                    |                    |
| Perencanaan,<br>Penganggaran, dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah                         |                                                         |                                                                                                                                                                        |                                                                                  |                           |                        |                          |                |                      |                                    |                    |
| Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah                                             | Capaian SAKIP Perangkat Daerah                          | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah                                                                                                                      | Meningkatnya Kualitas<br>Perencanaan,<br>Penganggaran Evaluasi<br>Kinerja Daerah |                           | B Opini                | 1 Dokumen                | 100 %          | 8.118.400,00         | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD)    |                    |
|                                                                                                   | Persentase Pemenuhan Penunjang<br>Pelayanan Perkantoran |                                                                                                                                                                        |                                                                                  | 100 %                     | 100 %                  |                          |                |                      |                                    |                    |
| Koordinasi dan<br>Penyusunan Laporan<br>Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD | Capaian SAKIP Perangkat Daerah                          | Jumlah Laporan Capaian<br>Kinerja dan Ikhtisar<br>SKPD dan Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan<br>Laporan Capaian Kinerja<br>dan Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD | Meningkatnya Kualitas<br>Perencanaan,<br>Penganggaran Evaluasi<br>Kinerja Daerah |                           | B Opini                | 1 laporan                | 100 %          | 10.293.500,00        | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD)    |                    |
|                                                                                                   | Persentase Pemenuhan Penunjang<br>Pelayanan Perkantoran |                                                                                                                                                                        |                                                                                  | 100 %                     | 100 %                  |                          |                |                      |                                    |                    |
| Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah                                                              | Capaian SAKIP Perangkat Daerah                          | Jumlah Laporan Evaluasi<br>Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                    | Meningkatnya Kualitas<br>Perencanaan,<br>Penganggaran Evaluasi<br>Kinerja Daerah |                           | B Opini                | 4 Laporn                 | 100 %          | 126.268.900,00       | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) |                    |
|                                                                                                   | Persentase Pemenuhan Penunjang<br>Pelayanan Perkantoran | Terlaksananya Evaluasi<br>Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                     |                                                                                  | 100 %                     | 100 %                  |                          |                |                      |                                    |                    |
| Administrasi<br>Keuangan Perangkat<br>Daerah                                                      |                                                         |                                                                                                                                                                        |                                                                                  |                           |                        |                          |                |                      |                                    |                    |

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Purwakarta

|                                                                   |                                                      |                                                                                  |                                                                            |  |            |                |       |                  |                              |  |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--|------------|----------------|-------|------------------|------------------------------|--|
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                 | Capaian SAKIP Perangkat Daerah                       | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                | Meningkatnya Pengelolaan dan Pelayanan Administrasi Keuangan Daerah        |  | B Opini    | 34 Orang/bulan | 100 % | 6.428.509.310,00 | Dana Perimbangan             |  |
|                                                                   | Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran |                                                                                  |                                                                            |  | 100 %      |                |       |                  |                              |  |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD       | Capaian SAKIP Perangkat Daerah                       |                                                                                  | Meningkatnya Pengelolaan dan Pelayanan Administrasi Keuangan Daerah        |  | B Opini    | 1 Laporan      | 100 % | 15.980.700,00    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  |
|                                                                   | Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran |                                                                                  |                                                                            |  | 100 %      | 100 %          |       |                  |                              |  |
| <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>     |                                                      |                                                                                  |                                                                            |  |            |                |       |                  |                              |  |
| Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Capaian SAKIP Perangkat Daerah                       | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah |  | B Opini    | 4 Laporan      | 100 % | 12.750.000,00    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  |
|                                                                   | Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perkantoran |                                                                                  |                                                                            |  | 100 %      |                |       |                  |                              |  |
| <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                         |                                                      |                                                                                  |                                                                            |  |            |                |       |                  |                              |  |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  | Capaian SAKIP Perangkat Daerah                       |                                                                                  | Meningkatnya Pengelolaan dan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat daerah  |  | B Opini    | 100 %          | 100 % | 35.480.000,00    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  |
|                                                                   | Persentase Pemunuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran |                                                                                  |                                                                            |  | 100 Persen |                |       |                  |                              |  |
|                                                                   | Persentase Pemunuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran |                                                                                  |                                                                            |  | 100 Persen |                |       |                  |                              |  |
| Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                 | Capaian SAKIP Perangkat Daerah                       |                                                                                  | Meningkatnya Pengelolaan dan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat daerah  |  | B Opini    | 100 %          | 100 % | 22.168.700,00    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  |
|                                                                   | Persentase Pemunuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran |                                                                                  |                                                                            |  | 100 Persen |                |       |                  |                              |  |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                  | Capaian SAKIP Perangkat Daerah                       | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                               | Meningkatnya Pengelolaan dan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat daerah  |  | B Opini    | 4 Paket        | 100 % | 106.826.059,00   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  |
|                                                                   | Persentase Pemunuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran |                                                                                  |                                                                            |  | 100 Persen |                |       |                  |                              |  |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                           | Capaian SAKIP Perangkat Daerah                       |                                                                                  | Meningkatnya Pengelolaan dan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat daerah  |  | B Opini    | 100 %          | 100 % | 38.500.000,00    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  |
|                                                                   | Persentase Pemunuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran |                                                                                  |                                                                            |  | 100 Persen |                |       |                  |                              |  |
| Fasilitasi Kunjungan Tamu                                         | Capaian SAKIP Perangkat Daerah                       | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                         | Meningkatnya Pengelolaan dan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat daerah  |  | B Opini    | 2Laporan       | 100 % | 15.000.000,00    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  |
|                                                                   | Persentase Pemunuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran |                                                                                  |                                                                            |  | 100 Persen |                |       |                  |                              |  |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD              | Capaian SAKIP Perangkat Daerah                       | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD              | Meningkatnya Pengelolaan dan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat daerah  |  | B Opini    | 12bulan        | 100 % | 111.461.100      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  |
|                                                                   | Persentase Pemunuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran |                                                                                  |                                                                            |  | 100 %      |                |       |                  |                              |  |

*Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024*

*Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Purwakarta*

|                                                                                                                     |                                                      |                                                                                                        |                                                                                |  |         |            |       |             |                              |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--|---------|------------|-------|-------------|------------------------------|--|
| <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                           |                                                      |                                                                                                        |                                                                                |  |         |            |       |             |                              |  |
| Pengadaan Mebel                                                                                                     | Capaian SAKIP Perangkat Daerah                       | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                     | Meningkatnya pengelolaan dan pelayanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah |  | B Opini | 3 Unit     | 100 % | 32.980.800  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  |
|                                                                                                                     | Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran |                                                                                                        |                                                                                |  | 100 %   |            |       |             |                              |  |
| Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                  | Capaian SAKIP Perangkat Daerah                       | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                   | Meningkatnya pengelolaan dan pelayanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah |  | B Opini | 3 Unit     | 100 % | 83.104.000  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  |
|                                                                                                                     | Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran |                                                                                                        |                                                                                |  | 100 %   |            |       |             |                              |  |
| <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                         |                                                      |                                                                                                        |                                                                                |  |         |            |       |             |                              |  |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      | Capaian SAKIP Perangkat Daerah                       | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | Meningkatnya pengelolaan dan pelayanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah |  | B Opini | 1 Laporan  | 100 % | 5.000.000   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  |
|                                                                                                                     | Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran |                                                                                                        |                                                                                |  | 100 %   |            |       |             |                              |  |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | Capaian SAKIP Perangkat Daerah                       | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | Meningkatnya pengelolaan dan pelayanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah |  | B Opini | 12 Laporan | 100 % | 100.000.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  |
|                                                                                                                     | Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran |                                                                                                        |                                                                                |  | 100 %   |            |       |             |                              |  |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | Capaian SAKIP Perangkat Daerah                       | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | Meningkatnya pengelolaan dan pelayanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah |  | B Opini | 12 Laporan | 100 % | 500.000.000 | Dana Perimbangan             |  |
|                                                                                                                     | Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran |                                                                                                        |                                                                                |  | 100 %   |            |       |             |                              |  |
| <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                        |                                                      |                                                                                                        |                                                                                |  |         |            |       |             |                              |  |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Cakupan SAKIP Perangkat Daerah                       | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Meningkatnya Kualitas Aset Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah               |  | B Opini | 5 Unit     | 100 % | 75.000.000  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  |
|                                                                                                                     | Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran |                                                                                                        |                                                                                |  | 100 %   |            |       |             |                              |  |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | Cakupan SAKIP Perangkat Daerah                       | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Meningkatnya Kualitas Aset Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah               |  | B Opini | 114 Unit   | 100 % | 100.000.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  |
|                                                                                                                     | Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran |                                                                                                        |                                                                                |  | 100 %   |            |       |             |                              |  |
|                                                                                                                     | Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran |                                                                                                        |                                                                                |  | 100 %   |            |       |             |                              |  |
| Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       | Cakupan SAKIP Perangkat Daerah                       | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | Meningkatnya Kualitas Aset Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah               |  | B Opini | 1 Unit     | 100 % | 200.000.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  |
|                                                                                                                     | Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran |                                                                                                        |                                                                                |  | 100 %   |            |       |             |                              |  |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi                                                                                           | Cakupan SAKIP Perangkat Daerah                       | Jumlah Sarana dan                                                                                      | Meningkatnya Kualitas                                                          |  | B Opini | 36 Unit    | 100 % | 100.000.000 | PENDAPATAN                   |  |

*Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024*

*Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Purwakarta*

|                                                                                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                               |                                                                                                                |       |       |           |       |                    |                              |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------|-------|--------------------|------------------------------|--|
| asi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                                     | Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran                                                                 | Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                        | Aset Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah                                                                     |       | 100 % |           |       |                    | ASLI DAERAH (PAD)            |  |
| <b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>                                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                               |                                                                                                                |       |       |           |       | <b>357.200.000</b> |                              |  |
| <b>Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</b> |                                                                                                                      |                                                                                                               |                                                                                                                |       |       |           |       |                    |                              |  |
|                                                                                                                                                            | Persentase Stakeholder/Mitra Kerja dan Masyarakat Diseluruh Tingkat Wilayah Yang Mendapat Pembinaan Advokasi dan KIE |                                                                                                               |                                                                                                                |       | 100 % |           |       |                    |                              |  |
| Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota                                                             | Cakupan Kerjasama Penyelenggaraan Pendidikan Formal, Non Formal dan Informal Yang Melakukan Pendidikan Kependudukan  | Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota | Meningkatnya pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota 1 | 100 % | 100 % | 1 Dokumen | 100 % | 25.000.000         | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  |
|                                                                                                                                                            | Persentase Stakeholder/Mitra Kerja dan Masyarakat Diseluruh Tingkat Wilayah Yang Mendapat Pembinaan Advokasi dan KIE |                                                                                                               |                                                                                                                |       | 100 % |           |       |                    |                              |  |
|                                                                                                                                                            | Persentase Stakeholder/Mitra Kerja dan Masyarakat Diseluruh Tingkat Wilayah Yang Mendapat Pembinaan Advokasi dan KIE |                                                                                                               |                                                                                                                |       | 100 % |           |       |                    |                              |  |
| Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga                                                                                                     | Cakupan Kerjasama Penyelenggaraan Pendidikan Formal, Non Formal dan Informal Yang Melakukan Pendidikan Kependudukan  |                                                                                                               | Meningkatnya pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota 1 | 100 % | 100 % | 100 %     | 100 % | 75.000.000         | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  |
|                                                                                                                                                            | Persentase Stakeholder/Mitra Kerja dan Masyarakat Diseluruh Tingkat Wilayah Yang Mendapat Pembinaan Advokasi dan KIE |                                                                                                               |                                                                                                                |       | 100 % |           |       |                    |                              |  |

|                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                              |       |       |           |       |            |                              |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------|-------|------------|------------------------------|--|
| Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK                                  | Cakupan Kerjasama Penyelenggaraan Pendidikan Formal, Non Formal dan Informal Yang Melakukan Pendidikan Kependudukan  | Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) | Meningkatnya pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota | 100 % | 100 % | 1 Laporan | 100 % | 75.000.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  |
|                                                                               | Persentase Stakeholder/Mitra Kerja dan Masyarakat Diseluruh Tingkat Wilayah Yang Mendapat Pembinaan Advokasi dan KIE |                                                                                                                       |                                                                                                              |       | 100 % |           |       |            |                              |  |
| <b>Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b> |                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                              |       |       |           |       |            |                              |  |
| Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga   | Cakupan Kerjasama Penyelenggaraan Pendidikan Formal, Non Formal dan Informal Yang Melakukan Pendidikan Kependudukan  |                                                                                                                       | Meningkatnya pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah kabupaten/kota                          |       | 100 % | 1 Dokumen | 100 % | 25.000.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  |
|                                                                               | Persentase Stakeholder/Mitra Kerja dan Masyarakat Diseluruh Tingkat Wilayah Yang Mendapat Pembinaan Advokasi dan KIE |                                                                                                                       |                                                                                                              |       | 100 % |           |       |            |                              |  |
|                                                                               | Persentase Stakeholder/Mitra Kerja dan Masyarakat Diseluruh Tingkat Wilayah Yang Mendapat Pembinaan Advokasi dan KIE |                                                                                                                       |                                                                                                              |       | 100 % |           |       |            |                              |  |
| Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga            | Cakupan Kerjasama Penyelenggaraan Pendidikan Formal, Non Formal dan Informal Yang Melakukan Pendidikan Kependudukan  |                                                                                                                       | Meningkatnya pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah kabupaten/kota                          |       | 100 % | 100 %     | 100 % | 75.000.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  |
|                                                                               | Persentase Stakeholder/Mitra Kerja dan Masyarakat Diseluruh Tingkat Wilayah Yang Mendapat Pembinaan Advokasi dan KIE |                                                                                                                       |                                                                                                              |       | 100 % |           |       |            |                              |  |
| Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB          | Cakupan Kerjasama Penyelenggaraan Pendidikan Formal, Non Formal dan Informal Yang Melakukan Pendidikan Kependudukan  |                                                                                                                       | Meningkatnya pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah kabupaten/kota                          |       | 100 % | 2 Dokumen | 100 % | 82.200.000 | DAK Non Fisik-BOKB-KB        |  |

|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                       |  |       |            |       |                      |                              |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|------------|-------|----------------------|------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                          | Persentase Stakeholder/Mitra Kerja dan Masyarakat Diseluruh Tingkat Wilayah Yang Mendapat Pembinaan Advokasi dan KIE |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                       |  | 100 % |            |       |                      |                              |  |
| <b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>                                                                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                       |  |       |            |       | <b>7.732.621.000</b> |                              |  |
| <b>Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal</b>                                           |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                       |  |       |            |       |                      |                              |  |
| Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal                                                                              | Cakupan pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif                                                            | Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal                                                                                             | Meningkatnya pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian dan KB Sesuai |  | 87 %  | 1 kegiatan | 100 % | 150.000.000          | DAK Non Fisik-BOKB-KB        |  |
| Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK                                                                                                                       | Cakupan pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif                                                            | Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)                                                                                                                           | Meningkatnya pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian dan KB Sesuai |  | 87 %  | 1 Unit     | 100 % | 160.000.000          | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  |
| Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK                                                                                                             | Cakupan pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif                                                            | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)                                                                                                             | Meningkatnya pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian dan KB Sesuai |  | 87 %  | 9 Balai    | 100 % | 79.650.000           | DAK Non Fisik-BOKB-KB        |  |
| <b>Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</b>                                                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                       |  |       |            |       |                      |                              |  |
| Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB                                                                                                           | Cakupan pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif                                                            | Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB                                                                                               | Meningkatnya Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan                                        |  | 87 %  | 12 Kali    | 100 % | 808.000.000          | DAK Non Fisik-BOKB-KB        |  |
| Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) | Cakupan pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif                                                            | Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) | Meningkatnya Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan                                        |  | 87 %  | 12 Laporan | 100 % | 1.500.000.000        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  |



|                                                                                                                                                                                                        |                                                              |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                              |  |      |            |       |               |                                                    |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|------------|-------|---------------|----------------------------------------------------|--|
| Penggerakan Kader<br>Institusi Masyarakat<br>Pedesaan (IMP)                                                                                                                                            | Cakupan pasangan usia subur<br>yang menjadi peserta KB aktif | Jumlah Kader yang<br>Mengikuti Penggerakan<br>Kader Institusi Masyarakat<br>Pedesaan (IMP)                                                                                          | Meningkatnya<br>Pendayagunaan tenaga<br>penyuluh KB/petugas<br>lapangan                                                                                      |  | 87 % | 5 kegiatan | 100 % | 550.000.000   | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD)                 |  |
| <b>Pengendalian dan<br/>Pendistribusian<br/>Kebutuhan Alat dan<br/>Obat Kontrasepsi serta<br/>Pelaksanaan<br/>Pelayanan KB di<br/>Daerah<br/>Kabupaten/Kota</b>                                        |                                                              |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                              |  |      |            |       |               |                                                    |  |
| Pengendalian<br>Pendistribusian Alat<br>dan Obat Kontrasepsi<br>dan Sarana Penunjang<br>Pelayanan KB ke<br>Fasilitas Kesehatan<br>Termasuk Jaringan dan<br>Jejarinya                                   | Cakupan pasangan usia subur<br>yang menjadi peserta KB aktif | Jumlah Laporan<br>Pengendalian<br>Pendistribusian Alat dan<br>Obat Kontrasepsi dan<br>Sarana Penunjang<br>Pelayanan KB ke Fasilitas<br>Kesehatan Termasuk<br>Jaringan dan Jejarinya | Meningkatnya<br>Pengendalian dan<br>pendistribusian<br>kebutuhan alat dan obat<br>kontrasepsi dan<br>pendayagunaan tenaga<br>penyuluh KB/petugas<br>lapangan |  | 87 % | 150 faskes | 100 % | 96.900.000    | DAK Non Fisik-<br>BOKB-KB                          |  |
| Peningkatan Kesertaan<br>Penggunaan Metode<br>Kontrasepsi Jangka<br>Panjang (MKJP)                                                                                                                     | Cakupan pasangan usia subur<br>yang menjadi peserta KB aktif | Jumlah Orang yang<br>Mengikuti Kesertaan<br>Penggunaan Metode<br>Kontrasepsi Jangka<br>Panjang (MKJP)                                                                               | Meningkatnya<br>Pengendalian dan<br>kebutuhan alat dan obat<br>kontrasepsi dan<br>pendayagunaan tenaga<br>penyuluh KB/petugas<br>lapangan                    |  | 87 % | 7 Jenis    | 100 % | 2.149.393.000 | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD)                 |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                              | Terlaksananya<br>peningkatan MKJP                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                              |  |      | 100 %      |       |               |                                                    |  |
| Penyediaan Dukungan<br>Ayoman Komplikasi<br>Berat dan Kegagalan<br>Penggunaan MKJP                                                                                                                     | Cakupan pasangan usia subur<br>yang menjadi peserta KB aktif | Jumlah Laporan<br>Dukungan Ayoman<br>Komplikasi Berat dan<br>Kegagalan Penggunaan<br>MKJP                                                                                           | Meningkatnya<br>Pengendalian dan<br>pendistribusian<br>kebutuhan alat dan obat<br>kontrasepsi dan<br>pendayagunaan tenaga<br>penyuluh KB/petugas<br>lapangan |  | 87 % | 500 kasus  | 100 % | 100.000.000   | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD)                 |  |
| Penyediaan Sarana<br>Penunjang Pelayanan<br>KB                                                                                                                                                         | Cakupan pasangan usia subur<br>yang menjadi peserta KB aktif | Jumlah Unit Sarana<br>Penunjang Pelayanan KB                                                                                                                                        | Meningkatnya<br>Pengendalian dan<br>pendistribusian<br>kebutuhan alat dan obat<br>kontrasepsi dan<br>pendayagunaan tenaga<br>penyuluh KB/petugas<br>lapangan |  | 87 % | 1 Unit     | 100 % | 861.678.000   | DAK Fisik-Bidang<br>Kesehatan dan<br>KB-Reguler-KB |  |
| Dukungan Operasional<br>Pelayanan KB Bergerak                                                                                                                                                          | Cakupan pasangan usia subur<br>yang menjadi peserta KB aktif | Jumlah Laporan<br>Dukungan Operasional<br>Pelayanan KB Bergerak                                                                                                                     | Meningkatnya<br>Pengendalian dan<br>pendistribusian<br>kebutuhan alat dan obat<br>kontrasepsi dan<br>pendayagunaan tenaga<br>penyuluh KB/petugas<br>lapangan |  | 87 % | 2 kegiatan | 100 % | 500.000.000   | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD)                 |  |
| <b>Pemberdayaan dan<br/>Peningkatan Peran<br/>Serta Organisasi<br/>Kemasyarakatan<br/>Tingkat Daerah<br/>Kabupaten/Kota<br/>dalam Pelaksanaan<br/>Pelayanan dan<br/>Pembinaan Kesertaan<br/>Ber-KB</b> |                                                              |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                              |  |      |            |       |               |                                                    |  |

|                                                                                                                                                                              |                                                                                                              |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |       |               |       |                      |                                              |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|-------|----------------------|----------------------------------------------|--|
| Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB                                           | Cakupan pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif                                                    | Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB    | Meningkatnya pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah dan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan | 87 %  | 6 kegiatan    | 100 % | 250.000.000          | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                 |  |
| Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB                                                                                                                      | Cakupan pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif                                                    | Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB           | Meningkatnya pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah dan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan | 87 %  | 34 Kampung kb | 100 % | 527.000.000          | DAK Non Fisik-BOKB-KB                        |  |
| <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>                                                                                                          |                                                                                                              |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |       |               |       | <b>6.438.000.000</b> |                                              |  |
| <b>Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>                                                                               |                                                                                                              |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |       |               |       |                      |                                              |  |
| Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)                                | Persentase partisipasi kelompok tribina dan UPPKS dalam ketahanan keluarga dan pemberdayaan ekonomi keluarga | Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)                          | Meningkatnya pelaksanaan pembangunan keluarga                                                                                                        | 100 % | 20 Unit       | 100 % | 360.000.000          | DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB |  |
| Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)                          | Persentase partisipasi kelompok tribina dan UPPKS dalam ketahanan keluarga dan pemberdayaan ekonomi keluarga | Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | Meningkatnya pelaksanaan pembangunan keluarga                                                                                                        | 100 % | 5 Laporan     | 100 % | 250.000.000          | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                 |  |
| Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | Persentase partisipasi kelompok tribina dan UPPKS dalam ketahanan keluarga dan pemberdayaan ekonomi keluarga | Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)                  | Meningkatnya pelaksanaan pembangunan keluarga                                                                                                        | 100 % | 3340 Orang    | 100 % | 5.278.000.000        | DAK Non Fisik-BOKB-KB                        |  |
|                                                                                                                                                                              |                                                                                                              | Tersedianya Kelompok Kegiatan Ketahan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)                                   |                                                                                                                                                      |       | 100 %         |       |                      |                                              |  |
| <b>Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan</b>               |                                                                                                              |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |       |               |       |                      |                                              |  |

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Purwakarta

|                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                |  |       |              |       |                       |                              |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|--------------|-------|-----------------------|------------------------------|--|
| <b>dan Kesejahteraan Keluarga</b>                                                                                                                                                                                  |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                |  |       |              |       |                       |                              |  |
| Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | Persentase partisipasi kelompok tribina dan UPPKS dalam ketahanan keluarga dan pemberdayaan ekonomi keluarga | Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | Meningkatnya pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga |  | 100 % | 4 Laporan    | 100 % | 250.000.000           | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  |
| Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)         | Persentase partisipasi kelompok tribina dan UPPKS dalam ketahanan keluarga dan pemberdayaan ekonomi keluarga | Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)   | Meningkatnya pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga |  | 100 % | 3 organisasi | 100 % | 300.000.000           | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                |  |       |              |       | <b>22.665.262.469</b> |                              |  |

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang merupakan upaya – upaya khusus untuk melaksanakan serangkaian tindakan dalam mencapai tujuan dan sasaran, disamping itu juga kinerja pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta merupakan bagian integritas dalam proses perencanaan strategis pemerintah, guna terlaksananya dan tercapainya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari Korupsi, Kolosi, dan Nepotisme, maka sangat perlu sekali adanya program dan kegiatan yang akan dilaksanakan disuatu unit kerja serta dapat dipertanggung jawabkan dalam realisasi pelaksanaannya.

Sejalan dengan hal tersebut diatas kami menyadari bahwa dalam melaksanakan program dan kegiatan tersebut masih mengalami hambatan karena keterbatasan sarana dan prasarana pendukung serta kurangnya personil. Kaidah – kaidah pelaksanaan program dan Kegiatan berdasarkan rencana kerja PD Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta dan mengacu pada DPA

dengan alokasi anggaran sesuai dengan pagu APBD. Rencana tindak lanjut pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta pada tahun 2024 mendatang akan menetapkan 4 program, 16 kegiatan dan Sub Kegiatan 46 sesuai dengan program nasional yang dilaksanakan sesuai APBD tahun 2024.

Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 merupakan dokumen rencana kerja yang berfungsi sebagai pedoman perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 1 ( satu ) Tahun kedepan.

Demikian Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 disusun, diharapkan mampu melaksanakan tugas – tugas sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, walau dalam pelaksanaan kegiatan tersebut masih belum sempurna maupun mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, namun secara umum rencana kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta

tersebut sudah mencakup semua program pemerintahan dan pembangunan serta pemberdayaan kepada masyarakat.

**Kepala,  
Dinas Pengendalian Penduduk dan  
Keluarga Berencana  
Kabupaten Purwakarta**

**H.YAYAT HIDAYAT,S.Sos**  
NIP.19700215199703 1 009